



BUPATI BALANGAN

Paringin, 15 Juli 2025

Kepada :

Yth. Gubernur Provinsi Kalsel
Cq. Kepala Bappeda Provinsi Kalsel
di –

Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor : 050/1043/BAPPERIDA-BLG/2025

No.	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1	2	3	4
1.	Penyampaian Laporan Evaluasi RKPD Kabupaten Balangan Triwulan II Tahun Anggaran 2025	1 berkas	Demikian disampaikan sebagai bahan selanjutnya

 **BUPATI BALANGAN,**

H. ABDUL HADI, S.Ag.M.I.Kom

Rekapitulasi Evaluasi RKPD Kabupaten Balangan Triwulan II Tahun 2025											
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (2025)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang di Evaluasi Pada Triwulan II Tahun 2025				Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)				
1	2	3	4				5				
		K	APBD (Rp)	K (Sub Keg)	K (Kegiatan)	K (Program)	APBD (Rp)	K (Sub Keg)	K (Kegiatan)	K (Program)	APBD (Rp)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100	25.334.738.503	59,91	45,81	13,84	7.746.681.790	59,91	45,81	13,84	30,58%
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100	15.599.798.365	15,96	0	0	3.709.070.277	15,96	0	0	23,78%
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100	16.681.742.051	49,16	0	43,63	8.935.250.574	49,16	0	43,63	53,56%
4	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	100	473.570.056.215	40,38	47,13	87,27	126.064.134.796	40,38	47,13	87,27	26,62%
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	100	25.405.348.673	28,01	29,31	15,71	9.762.941.404	28,01	29,31	15,71	38,43%
6	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	100	42.399.181.296	31,41	50,72	55,36	10.283.541.675	31,41	50,72	55,36	24,25%
7	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	100	12.130.490.744	30,4	37,36	80,25	4.371.351.109	30,40	37,36	80,25	36,04%
8	Dinas Kesehatan	100	363.890.047.179	44,68	63,59	92,29	110.341.470.882	44,68	63,59	92,29	30,32%
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	100	303.050.898.721	24,08	25,29	49,77	22.433.265.372	24,08	25,29	49,77	7,40%
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	100	26.735.841.197	45,56	39,68	41,97	5.145.247.967	45,56	39,68	41,97	19,24%
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	100	71.037.273.398	49,87	24,46	31,37	40.446.898.379	49,87	24,46	31,37	56,94%
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100	1.161.258.388.793	13,51	43,03	72,77	76.240.299.667	13,51	43,03	72,77	6,57%
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100	121.934.040.318	18,25	0,89	2,24	40.511.394.695	18,25	0,89	2,24	33,22%
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100	12.914.605.871	66,6	49,08	39,18	3.638.047.516	66,60	49,08	39,18	28,17%
15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100	569.468.812.877	28,45	58,12	93,58	135.257.421.502	28,45	58,12	93,58	23,75%
16	Dinas Perhubungan	100	38.185.433.211	31,75	68,58	66,79	10.221.395.884	31,75	68,58	66,79	26,77%
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	100	17.499.981.788	15,58	33,97	0	6.421.325.569	15,58	33,97	0	36,69%
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	100	20.185.536.189								0,00%

19	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	100	45.729.180.030	27,42	39,77	49,92	10.629.363.945	27,42	39,77	49,92	23,24%
20	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	100	25.344.918.602	41,00	48,30	39,28	12.239.365.356	41,00	48,30	39,28	48,29%
21	Dinas Sosial	100	34.349.042.100	43,40	34,15	42,86	5.977.480.029	43,40	34,15	42,86	17,40%
22	Inspektorat	100	21.315.023.114	30,39	30,56	58,39	9.704.383.794	30,39	30,56	58,39	45,53%
23	Kecamatan Lampihong	100	7.567.578.814	35,60	50,31	30,17	2.955.274.041	35,60	50,31	30,17	39,05%
24	Kecamatan Awayan	100	5.726.546.072	63,40	54,19	99,77	2.909.758.432	63,40	54,19	99,77	50,81%
25	Kecamatan Batumandi	100	6.783.054.240	53,50	58,33	17,82	3.336.078.244	53,50	58,33	17,82	49,18%
26	Kecamatan Halong	100	6.491.860.314	45,64	94,97	34,47	3.015.570.495	45,64	94,97	34,47	46,45%
27	Kecamatan Juai	100	5.825.933.332	41,39	26,03	18,42	2.622.053.466	41,39	26,03	18,42	45,01%
28	Kecamatan Paringin	100	13.458.568.524	35,64	50	19,73	5.462.406.643	35,64	50,00	19,73	40,59%
29	Kecamatan Paringin Selatan	100	10.009.889.895	41,67	100	17,82	3.940.338.403	41,67	100,00	17,82	39,36%
30	Kecamatan Tebing Tinggi	100	6.167.568.439	62	58,33	0	2.597.875.715	62	58,33	0	42,12%
31	Sekretariat Daerah	100	317.816.160.588	78,17	25	0	65.458.665.920	78,17	24,97	0	20,60%
32	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	100	74.835.045.363	47,22	43,91	39,39	28.915.175.299	47,22	43,91	39,39	38,64%
			3.898.702.584.816	39,89	43,22	40,37	781.293.528.840	39,89	43,22	40,37	20,04%
								SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH

Paringin, 15 Juli 2025
BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI, S.Ag. M.I.Kom

RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BALANGAN TRIWULAN II TAHUN 2025									
NO	SKPD	Indikator	Target Tahun 2025		Realisasi S.d Triwulan II		Faktor Pendorong	Faktor penghambat	Tindak Lanjut Yang diperlukan
			K	Rp	K	Rp			
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71	10.056.762.940	0	4.831.592.095	(1) Komitmen dan dukungan pimpinan terhadap peningkatan nilai dan kualitas SAKIP SKPD; (2) Keberadaan dan dukungan sumber daya, khususnya SDM, anggaran, serta sarana dan prasarana, untuk meningkatkan nilai dan kualitas SAKIP SKPD; dan (3) Komunikasi dan koordinasi yang terjalin baik dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) terkait	(1) Belum optimalnya perencanaan kinerja, khususnya penetapan indikator dan penentuan target; (2) Belum optimalnya pelaporan kinerja, dimana masih ditemukan substansi yang tidak sesuai dengan ketentuan/regulasi serta tidak selarasnya laporan dengan perencanaan yang disusun; dan (3) Belum optimalnya evaluasi akuntabilitas kinerja yang salah satunya ditunjukkan dengan masih ada temuan berulang kelemahan AKIP berdasarkan evaluasi Inspektorat	(1) Melakukan perbaikan secara bertahap terhadap mekanisme perencanaan kinerja, antara lain dengan meningkatkan keterlibatan bidang-bidang teknis dalam penetapan indikator dan penentuan target kinerja; (2) Meningkatkan kualitas penyusunan laporan kinerja secara bertahap, antara lain meningkatkan partisipasi bidang-bidang teknis, keberadaan data yang valid dan reliabel, dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyusunan laporan; dan (3) Evaluasi akuntabilitas kinerja akan dilakukan secara rutin (triwulanan dan/atau semesteran) dalam rangka memastikan semua temuan inspektorat telah ditindaklanjuti dan tidak berulang serta memitigasi risiko dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi SKPD (jika ada) beserta alternatif solusi yang dapat ditempuh untuk mengatasi permasalahan dimaksud
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	91		88,19		(1) Komitmen dan dukungan pimpinan terhadap peningkatan dan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dalam pelayanan; dan (2) Keberadaan sumber daya, seperti SDM dan sarana dan prasarana yang mendukung	Masih kurangnya kompetensi petugas pelayanan sehingga pelayanan yang diterima masih belum bisa maksimal	(1) Melakukan evaluasi terhadap kinerja petugas pelayanan secara rutin setiap triwulan; dan (2) Memberikan pelatihan atau informasi tentang produk pelayanan yang ada kepada petugas pelayanan
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Talenta/Calon Talenta yang direkrut melalui jalur CPNS/PPPK	2,75%	10.629.088.200	0,00%	1.971.563.331			
		Persentase Talenta/Calon Talenta yang direkomendasikan penempatannya	100%		12,65%		(1) Tersedia data talenta/calon talenta yang telah mengikuti assesment (pejabat administrator, pengawas dan sebagian JF penyetaraan dan pelaksana)	(1) Belum semua PNS di assesment sehingga belum bisa dipetakan secara menyeluruh (2) Belum memiliki dokumen rencana suksesi	(1) Pelaksanaan assesment bagi seluruh PNS (2) Penyusunan Rencana Suksesi
		Persentase Hasil Pemetaan Talenta Pegawai yang dimanfaatkan	100%		0,00%		(1) MoU SIMATA sudah dilaksanakan dan Berita Acara Penyerahan shortcode sudah dilaksanakan (2) Anggaran dan Komitmen Pimpinan untuk Pelatihan Pegawai terkait Penggunaan Aplikasi SIMATA sudah disediakan	(1) Replikasi Aplikasi SIMATA masih dalam proses penempatan shortcode server dari PDN Pusat (2) Belum ada Training Pegawai untuk penggunaan Aplikasi SIMATA (3) Kasubag Umum dan Kepegawaian serta Kasubag Perencanaan masih ada yang belum diakomodir untuk identifikasi Pengembangan Kompetensi ASN (Bangkom Genetik)	(1) Percepatan operasional aplikasi SIMATA dan mengintegrasikannya dengan SIMPEG/SILKA (2) Identifikasi (pengetempakan) Nine Box (3) Percepatan Penyusunan Dokumen Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK)
		Persentase Talenta/Calon Talenta yang dinilai kinerjanya	100%		12,65%		(1) Pejabat Penilai Kinerja memberikan predikat kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dialog kinerja sehingga mendukung capaian target dari atasan langsung (PPK) (2) Adanya komitmen untuk mewujudkan Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh pimpinan dalam hal ini Bupati dan Kepala OPD	(1) Pemberian predikat kinerja ASN belum dilakukan secara maksimal, karena kurangnya pemahaman pimpinan, gaptek dan ketidaknyamanan dengan ASN yang lain sehingga ASN yang telah memberikan kinerja terbaik baik dalam pekerjaan maupun kreativitas/ inovasi, tidak terlahir/terhonor (2) Masih adanya mindset lama bahwa predikat kinerja adalah sebagai hal formalitas belaka (3) Monitoring Evaluasi Pengelolaan Kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan belum dilakukan secara	- Melaksanakan FGD Pengelolaan Kinerja sebagai upaya untuk terus memberikan informasi dan progress terbaru berkaitan dengan pengelolaan kinerja dengan peraturan yang baru - Melaksanakan pendampingan secara intensif bagi ASN yang memerlukan bantuan dalam penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai Tahunan dan hal-hal lainnya - Menyusun laporan monitoring dan evaluasi
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Talenta/Calon Talenta yang memperoleh Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan	100%	6.741.858.300	0,00%	943.526.364	(1) Anggaran untuk Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan tersedia (2) Komitmen Pimpinan untuk mendukung Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan	Pejabat yang bersangkutan menolak untuk diikuti dalam Diklat Kepemimpinan	Menyusun identifikasi Pejabat Struktural yang sudah Assessment untuk dilakukan Diklat Kepemimpinan
2	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) DISDUKAPIL	76,4 Nilai	10.034.671.794	79,1	3.889.367.892	Adanya koordinasi yang baik dengan pelaksana teknis kegiatan dalam percepatan pencapaian target kinerja dan keuangan	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 belum dikeluarkan oleh Inspektorat	Menunggu LHE AKIP dari Inspektorat
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rata-rata Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	93,33 %	754.516.500	91,50%	188.409.936	Tersedianya anggaran yang cukup serta tingkat kesadaran tertib adminduk meningkat	- Belum semua wajib KIA memiliki KIA - Belum maksimalnya Perjanjian Kerjasama dengan mitra usaha	- Memaksimalkan Perjanjian Kerjasama dengan mitra usaha - Melanjutkan kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan dan Kementerian Agama Kabupaten Balangan - Melakukan layanan jemput bola secara maksimal agar semua penduduk dapat terlayani dan terpenuhi dokumen kependudukannya.
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rata-rata Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	100%	580.334.000	99,69%	143.468.195	Kesadaran penduduk akan pentingnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil mulai meningkat namun belum pada penduduk pada wilayah yang terpencil.	Belum maksimalnya layanan secara langsung, karena terhalangnya jarak tempuh yang jauh dan masih kurangnya jangkauan internet di Desa.	- Melakukan sosialisasi - Koordinasi dengan aparat Desa dan Kecamatan untuk melaksanakan kegiatan layanan jemput bola
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase jumlah data kependudukan yang dimanfaatkan	100%	1.017.503.100	0%	145.358.086	tersedianya data kependudukan tingkat kabupaten pada awal semester	terbatasnya jumlah ASN pada bidang PIAK yang kompeten menyusun Profil Perkembangan Kependudukan	
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	100%	48.018.500	100%	4.747.000	tersedianya dukungan data dan OPD lain	terbatasnya jumlah ASN pada bidang PIAK yang kompeten menyusun Profil Perkembangan Kependudukan	
3	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	76,4 Nilai	10.396.265.284	0 Nilai	6.940.606.356	Pimpinan menjadikan akuntabilitas sebagai budaya organisasi, bukan sekadar kewajiban administratif.	Minimnya budaya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.	menjadwalkan rapat evaluasi kinerja secara berkala (bulanan/triwulan) yang terstruktur dan berbasis data.
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Kegiatan Penanganan Trantibum	750 Kegiatan	9.822.100.512	370 Kegiatan		Tersedianya regulasi daerah (Perda, Perkada) yang jelas sebagai dasar hukum penertiban.	Lemahnya komunikasi dalam pelaksanaan operasi gabungan atau tindakan lintas sektor	membuat Komitmen bersama untuk memastikan pelaksanaan kegiatan lintas sektor berjalan efektif.
		Persentase SDM Satpol PP yang Terdidik dan Terlatih	85%		40 %		adanya fasilitas peningkatan keterampilan lapangan (DALMAS)	Tidak tersedianya lokasi latihan khusus	Pelatihan Dalmas untuk anggota satpol PP secara berkala dengan mengoptimalkan sumberdaya yang tersedia
		Persentase Anggota Satlinmas yang di tingkatkan Kapasitasnya	100%		50 %		adanya Pengembangan kemampuan anggota Satlinmas melalui sosialisasi pembinaan anggota satlinmas desa dan kelurahan	Kurangnya motivasi dari anggota Satlinmas dapat mengurangi kinerja dan partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan.	mengembangkan rencana pemberdayaan yang komprehensif dan terstruktur untuk meningkatkan kinerja Satlinmas.
		Persentase terbentuknya kelompok budaya Masyarakat tani Perda	100%		50 %		Partisipasi masyarakat dalam proses penegakan perda dan perkada dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat.	Kurangnya sumber daya, seperti anggaran, peralatan, dan personel, dapat menghambat penegakan perda dan perkada.	Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang perda dan perkada untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan.
4	Inspektorat								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Inspektorat	74 (BB)	16.086.663.216	81,4 (A)	9.201.028.365	Adanya koordinasi yang baik dengan pelaksana teknis kegiatan dalam percepatan pencapaian target kinerja dan keuangan	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 masih dalam proses penyusunan Laporan	Menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi SAKIP ketika LHE sudah diterima
		Nilai IKM Inspektorat	88,25		87,05		Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik dari pimpinan terhadap terhadap pelaksana tentang pelayanan yang prima	Belum semua pelaksana memahami tentang pelayanan prima	Mengikutsertakan pelaksana Bimbingan Teknis Excellence Service

	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Prosentase SKPD yang selesai TLHP	60 Persen	2.602.493.200	0%	194.190.811	Adanya monitoring dan komunikasi intensif dari Inspektorat kepada audit serta penetapan tenggat waktu yang jelas untuk penyelesaian TLHP	Belum semua audit memiliki pemahaman memadai tentang kewajiban menindaklanjuti TLHP sesuai tenggat waktu	Melakukan frekuensi monitoring dan evaluasi penyelesaian TLHP audit
		Persentase perangkat daerah yang memiliki kemitatan mitigasi risiko yang baik	70		0%		Adanya komitmen pimpinan perangkat daerah dalam penerapan manajemen risiko	Minimnya pemahaman teknis tentang metode identifikasi dan analisis risiko	Menyelenggarakan bimbingan teknis dan atau asistensi penyusunan profil risiko perangkat daerah
		Prosentase SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi internal SAKIP lebih dari 80 %	70		0%		Adanya SKPD yang responsif terhadap perbaikan tata kelola dan kinerja birokrasi	Kurangnya mekanisme kontrol untuk memastikan tindak lanjut rekomendasi tepat waktu	Meningkatkan pemantauan dan penguatan peran pengendalian internal atas implementasi rekomendasi
	PROGRAM PERUMUSAN KEBUJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Prosentase OPD yang diusulkan ke TPN ZI WBK/WBBM	28	2.318.591.600	100%		Adanya unit kerja yang telah membentuk tim kerja ZI dan berkomitmen melengkapi dokumen LKE	Kurangnya pemahaman dan motivasi perangkat daerah tentang manfaat ZI WBK/WBBM	Menyelenggarakan sosialisasi dan klinik pendampingan intensif untuk penyusunan dokumen pendukung ZI
		Prosentase tindak lanjut rekomendasi hasil koordinasi pelaksanaan RB	90				Ada sinergi antara Inspektorat dengan Bagian Organisasi dalam penyampaian rekomendasi RB	Lemahnya mekanisme pelaporan dan pelacakan implementasi rekomendasi RB di OPD	Membentuk sistem monitoring dan evaluasi berbasis aplikasi atau dashboard real time untuk pelaksanaan RB
		Nilai MCP	93				Terjalannya kerja sama yang erat antara Inspektorat dan seluruh OPD pelaksana area MCP	Belum optimalnya pengisian dan pelaporan data pada aplikasi JAGA KPK secara berkala	Mendorong percepatan pemutakhiran data MCP serta penugasan PIC MCP di setiap area oleh kepala OPD
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	72.6 Nilai	8.560.958.909	0	3.526.773.653	Pekerjaan sudah didukung dengan Sistem Informasi/Digitalisasi	Tahapan Perencanaan yang jalan secara paralel baik penyusunan Renstra, Renja Perubahan 2025 dan Renja 2026 serta pemenuhan dokumen lain seperti SPIP	Memaksimalkan Sumber Daya yang tersedia
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Sektor Potensi Investasi Baru	1 Potensi	547.672.000	0	13.442.000	Adanya peta potensi investasi	Peta potensi belum berbasis Geospasial	Penyesuaian anggaran untuk penyediaan /Belanja Modal Aplikasi/Geospasial
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Persetujuan Investasi / Rencana Investasi	400 Milyar	713.896.800	264,75	84.829.500	Adanya IPRO/ Proyek Investasi yang siap ditawarkan	Minimnya event pameran Investasi yang menghadirkan investor skala Nasional	Berkordinasi dengan Provinsi terkait Event
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	88,9 Nilai	4.505.022.100	91	279.393.250	Sebagian besar sistem pelayanan berbasis Elektronik/Digital	Perubahan regulasi pada beberapa produk perizinan	Rapat Tim Teknis penyesuaian SOP Perizinan
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha Yang Menyampaikan LKPM	90%	343.000.000	73%	71.372.000	Adanya target realisasi investasi yang harus dicapai (direalisasikan)	Sebagian Pelaku Usaha Menengah dan Besar kantor pusat berada di Luar Daerah sehingga koordinasi kurang maksimal	Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaporan LKPM
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal yang Dikelola Secara Elektronik	100%	286.650.000	80	72.937.850	Dukungan dari Tim Satu Data Kabupaten yang terdiri dari Bapperida, Diskominfo dan BPS dengan melaksanakan Pembinaan Rutin Pengelolaan Data	Belum tersedianya SOP Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	Melakukan perbaikan secara berkala terkait Standar data
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	81,7 Angka	20.644.253.536	80,70	8.910.532.450	Adanya koordinasi antara stakeholder internal dan eksternal	Masih dalam tahap penilaian evaluator Inspektorat	Memberdayakan sumber daya yang ada secara maksimal
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik	39,24 Persen	37.892.187.000	34,55	1.048.885.400	Tersedianya anggaran sesuai dengan kebutuhan, koordinasi antar SKPD dan masyarakat sudah dilaksanakan terkait dengan pelaksanaan di lapangan	proses koordinasi proses pemilihan penyedia, kurangnya ketersediaan SDM personil UKPBJ, personil bidang teknis yang terbatas untuk melaksanakan proses PBJ, serta cuaca musim hujan	segera melaksanakan kegiatan agar realisasi dapat meningkat dan jika bisa adanya penambahan personil pegawai
		Persentase tobing rusak yang ditangani	20,68 Persen	41.097.907.600	5	293.078.721	Tersedianya anggaran sesuai dengan kebutuhan, koordinasi antar SKPD dan masyarakat sudah dilaksanakan terkait dengan pelaksanaan di lapangan	proses koordinasi proses pemilihan penyedia, kurangnya ketersediaan SDM personil UKPBJ, personil bidang teknis yang terbatas untuk melaksanakan proses PBJ, serta cuaca musim hujan	segera melaksanakan kegiatan agar realisasi dapat meningkat dan jika bisa adanya penambahan personil pegawai
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang terakses air bersih layak	89,89 Persen	8.385.390.000	89,31	1.085.305.600	Tersedianya anggaran sesuai dengan kebutuhan, koordinasi antar SKPD dan masyarakat sudah dilaksanakan terkait dengan pelaksanaan di lapangan	proses koordinasi proses pemilihan penyedia, kurangnya ketersediaan SDM personil UKPBJ, personil bidang teknis yang terbatas untuk melaksanakan proses PBJ, serta cuaca musim hujan	segera melaksanakan kegiatan agar realisasi dapat meningkat dan jika bisa adanya penambahan personil pegawai
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang terakses sanitasi layak	100 Persen	23.511.015.700	98,85	1.047.404.927	Tersedianya anggaran sesuai dengan kebutuhan, koordinasi antar SKPD dan masyarakat sudah dilaksanakan terkait dengan pelaksanaan di lapangan	proses koordinasi proses pemilihan penyedia, kurangnya ketersediaan SDM personil UKPBJ, personil bidang teknis yang terbatas untuk melaksanakan proses PBJ, serta cuaca musim hujan	segera melaksanakan kegiatan agar realisasi dapat meningkat dan jika bisa adanya penambahan personil pegawai
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan/gedung sesuai standart	95 Persen	355.274.217.554	94,35	27.598.903.564	Tersedianya anggaran sesuai dengan kebutuhan	proses koordinasi proses pemilihan penyedia, kurangnya ketersediaan SDM personil UKPBJ, personil bidang teknis yang terbatas untuk melaksanakan proses PBJ, serta cuaca musim hujan	Paket pekerjaan yang masih berproses akan segera dilaksanakan sebagian paket strategis sudah berkontrak dan melaksanakan pekerjaan fisik di lapangan, termasuk paket-paket yang tenderle purchasing
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah Bangunan yang ditata	5 Buah	61.340.350.387	0	5.812.452.422	Tersedianya anggaran sesuai dengan kebutuhan	proses koordinasi proses pemilihan penyedia, kurangnya ketersediaan SDM personil UKPBJ, personil bidang teknis yang terbatas untuk melaksanakan proses PBJ, serta cuaca musim hujan	Paket pekerjaan yang masih berproses akan segera dilaksanakan sebagian paket strategis sudah berkontrak dan melaksanakan pekerjaan fisik di lapangan, termasuk paket-paket yang tenderle purchasing
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase kerusakan jalan	31,53 Persen	354.338.572.100	51,87	24.525.842.095	Anggaran yang tersedia	Masih ada sebagian paket pekerjaan yang masih berproses dalam pelaksanaan pengadaan E Katalog dan Proses Pengadaan Langsung	Pekerjaan yg sudah selesai proses E Katalog, sudah pelaksanaan fisik di lapangan. Kemudian paket pekerjaan yang masih berproses akan segera dilaksanakan
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase jasa konstruksi yang terampil	60 Persen	5.395.123.000	58	2.148.853.638	Anggaran yang tersedia	pekerjaan fisik belum ada yang mulai melaksanakan pekerjaan	setelah ada pekerjaan proyek segera akan kami laksanakan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketersediaan dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang	65 Persen	2.135.804.800	60	264.982.715	Anggaran yang tersedia	Regulasi mengenai proses penetapan dan pengesahan rencana tata ruang (RTRW & RDTR) yang mengharuskan keterlibatan instansi vertikal dan pemerintah provinsi	Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 Persen	1.182.883.600	50	92.821.200	- Dukungan dari Pimpinan Daerah dalam Bantuan Rumah Bagi Korban Bencana	- Masih Banyaknya Rumah terdampak Bencana di Kabupaten Balangan	- Melaksanakan Koordinasi dengan Pihak terkait dalam Pengawasan dan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana
							Adanya Dukungan dari Kodim 1001/HSU-BLG Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Bagi Korban Bencana di Wilayah Kabupaten Balangan		

	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luas kawasan kumuh yang tertangani	2.64958 Ha	11.078.431.000	0	220.418.880	Koordinasi yang baik antar SKPD pengampu penanganan kawasan Kumuh, partisipasi aktif masyarakat, Anggaran yang memadai, Kebijakan Pemerintah yang mendukung	Kurangnya Koordinasi antar SKPD dalam penanganan wilayah kumuh, kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam upaya penanganan dan pencegahan kawasan kumuh, masalah kepemilikan lahan	Melakukan koordinasi dengan SKPD yang mengampu kegiatan penanganan kawasan kumuh, Memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih memahami tentang kawasan kumuh serta cara penanganan, Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tidak layak huni	2 Persen	32.643.707.300	2.86	358.800.000	Dukungan dari Pimpinan Daerah dalam penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Balangan	Masih Banyaknya RTLH di Kabupaten Balangan dan yang berada di bantaran sungai	- Melaksanakan Koordinasi dengan Pihak terkait dalam Pengawasan dan Pelaksanaan Rehabilitasi
							Adanya Dukungan dari Kodim 1001/HSU-BLG Dalam Pelaksanaan Program Bantuan RTLH di Wilayah Kabupaten Balangan		- Perlu adanya koordinasi antara dinas teknis dengan aparat kecamatan dan desa mengenai data masyarakat yang MBR yang menerima Bantuan Rumah Swadaya
							Adanya Dukungan dari Polres Balangan Dalam Pelaksanaan Program Bantuan RTLH di Wilayah Kabupaten Balangan		
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	91 Persen	128.404.825.858	90	2.834.518.055	Anggaran yang dibutuhkan tersedia	Proses serah terima hibah PSU belum 100%	Perlu percepatan proses serah terima hibah PSU
7	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76 Nilai	51.973.700.584	76 *	16.305.682.342	Anggaran seleh efisiensi masih mencukupi untuk fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Perubahan Sistem pengadaan barang dan jasa dengan E-Katalog Versi	Koordinasi intens dengan pihak ULP untuk percepatan realisasi barang dan jasa
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tingkat Pelayanan Pelaksanaan Tugas DPRD	100 Persen	22.861.344.779	55.16 %	11.696.341.656			
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip BPBD	73,65	10.344.464.051	73.65	6.123.509.984			
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara yang mendapat layanan perlindungan terhadap ancaman bencana	100%	6.147.577.900	20%	2.739.757.590	Tersedianya dukungan anggaran yang cukup setelah dilakukan efisiensi dalam melaksanakan Kegiatan Pelayanan Penanggulangan Kebencanaan	Masih Perlu Peningkatan kapasitas SDM sebagai narasumber dalam pelayanan pencegahan kebencanaan	Perlu Peningkatan Kapasitas Aparatur Kebencanaan dalam hal manajemen kebencanaan
	PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEKABARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase warga negara yang mendapat layanan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan bencana kebakaran dan non kebakaran	100%	2.481.980.000	10%	71.963.000	Tersedianya dukungan anggaran yang cukup setelah dilakukan efisiensi dalam melaksanakan Kegiatan Pelayanan Pencegahan Kebakaran		
9	Sekretariat Daerah								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi kebijakan bidang administrasi umum yang terlaksana	100%	107.513.542.788	100%	32.401.639.809	Tersedianya dukungan anggaran yang cukup setelah dilakukan efisiensi dalam melaksanakan Kegiatan Pada program Penunjang urusan Pemerintah Daerah kabupaten/ Kota	Masih Perlu Peningkatan kapasitas SDM dan Kurangnya Koordinasi antar SKPD pada unit Kerja Garis Koordinasi	socialisasi dan Koordinasi (FGD)
		Rata-Rata capaian kinerja SKPD dan unit kerja garis koordinasi	100%						
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Realisasi Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang terlaksana	100%	206.340.319.100	100%	31.668.514.177	Tersedianya dukungan anggaran yang cukup setelah dilakukan efisiensi dalam melaksanakan Kegiatan Pada program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Masih Perlu Peningkatan kapasitas SDM dan Kurangnya Koordinasi antar SKPD pada unit Kerja Garis Koordinasi	socialisasi dan Koordinasi (FGD)
		Rata-rata capaian kinerja SKPD dan Unit Kerja Garis Koordinasi	100%						
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Realisasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang terlaksana	100%	3.962.298.700	100%	1.406.899.134	Tersedianya dukungan anggaran yang cukup setelah dilakukan efisiensi dalam melaksanakan Kegiatan Pada program Perekonomian dan Pembangunan	Masih Perlu Peningkatan kapasitas SDM dan Kurangnya Koordinasi antar SKPD pada unit Kerja Garis Koordinasi	socialisasi dan Koordinasi (FGD)
		Rata-rata capaian kinerja SKPD dan Unit Kerja Garis Koordinasi	100%						
10	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	78 Nilai	39.411.552.654	75,45 Nilai	9.211.521.565	Tersedianya Anggaran, Kerjasama/ Koordinasi yang baik antar bidang	Masih kurangnya pemahaman sebagian ASN mengenai Target dan Sasaran Program Kegiatan	Moniv Berkelanjutan, Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan bidang teknis
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Cakupan tersusunnya Dokumen Penganggaran sesuai ketentuan Ketetapan Wakil Penyempaian APBD	88 Nilai		80,69 Nilai		Adanya kesadaran dan komitmen yang tinggi antara Kepala Daerah dan DPRD dalam perencanaan dan penganggaran APBD, Penguasaan Aplikasi SPD-RU untuk mempermudah pengelolaan dan pengawasan serta upaya dalam memenuhi kebutuhan informasi secara cepat lengkap, tepat untuk menunjang memproses penganggaran	Keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang mengalami keterlambatan, koordinasi dan hubungan kerjasama antara individu maupun dengan instansi lain yang berkaitan dengan penganggaran belum optimal	Meningkatkan kerjasama/ Koordinasi antara individu maupun dengan instansi lain terkaitan penganggaran, Melakukan Pembinaan melalui sosialisasi dan pendampingan kepada SKPD dan pihak terkait dalam Penyusunan Dokumen Penganggaran
		Persentase Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	88 Nilai	495.169.870.661	80,69 Nilai	115.506.607.406	Sistem transparan dan konsisten, sarana dan prasarana yang memadai, digitalisasi keuangan daerah	Lemahnya Pemahaman dan pelaksanaan terhadap toposki serta kewenangan yang telah ditetapkan, ketimpangan antara instansi terkait	Pembinaan SDM yang berkelanjutan, Peningkatan dan penempatan toposki berdasarkan kemampuan dan klasifikasi personal instansi terkait
		Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai SAP	88 Nilai		80,69 Nilai		Pemahaman yang baik tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kompetensi sumber daya manusia yang memadai, pengendalian internal yang kuat, serta penyusunan laporan keuangan yang akurat dan transparan	Kompetensi SDM, Ketidaktahuan terhadap Peraturan, dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit BPK terhadap Pencapaian Opini WTP atas LKPD Kabupaten Balangan	Meningkatkan kualitas data dan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan serta meningkatkan kompetensi dan pemahaman sumber daya manusia terkait pengelolaan keuangan.
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	2.7 Angka	25.723.736.500	2.62 Angka	516.724.672	Adanya Aplikasi penatausahaan BMD (SIPANDA BMD), Dukungan pengguna barang yang lebih optimal	Belum optimalnya tindak lanjut pengguna barang pada proses-proses dalam penatausahaan BMD, adanya pergantian SDM petugas Aset pada tahun berjalan	Melakukan pengembangan aplikasi Penatausahaan BMD (Aplikasi Sipanda BMD), Peningkatan Kompetensi SDM Petugas Aset melalui kegiatan workshop pengelolaan BMD, Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pengguna barang

	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	100 Persen		93,09%		Mengoptimalkan pendapatan daerah untuk membangun daerah agar lebih baik	Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak untuk membangun daerah	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap desa atau masyarakat
		Persentase Kepatuhan Wajib Pajak	100 Persen	4.077.224.700	42,88%	829.281.153	Adanya mobil Operasional untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak dan informasi tentang pajak	Penagihan Pajak masih dilakukan jemput bola ke tempat usaha wajib pajak karena masih rendahnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak daerah	Mengembangkan dan memperbaiki sistem teknologi informasi untuk memudahkan pembayaran dan pengawasan pajak. Sosialisasi dan penagihan yang di dampingi oleh Satpol PP Balangan
		Jumlah Laporan Realisasi APBD	100 Persen		50%		Adanya Laporan Realisasi APBD yang tepat waktu	Wajib pajak yang mengajukan permohonan keberatan belum melengkapi persyaratan yang sudah di tentukan	Menindaklanjuti permohonan keberatan PBB P2
11	Dinas Kesehatan								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	73 Angka/Nilai	195.132.137.744	0	77.381.651.069	Tersedianya Anggaran Tersedianya Kebijakan Tersedianya dokumen-dokumen Penunjang penilaian SAKIP	Perubahan kebijakan tentang efisiensi anggaran	Monitoring dan evaluasi berkelanjutan
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu hamil dengan risiko tinggi	20 %	1.930.164.000	14,90%	373.256.000	Terlaksananya Kegiatan Pendampingan oleh dokter spesialis kandungan dan kebidanan, Terlaksannaya Kegiatan Kelas Ibu hamil di Desa	Tidak semua ibu hamil berisiko tinggi yang harus di rujuk untuk mendapatkan tindak lanjut mau ke Rumah Sakit Rujukan Belum semua Puskesmas melaksanakan kelas ibu hamil.	Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran ibu hamil beserta keluarga tentang resiko tinggi kehamilan dan pentingnya penanganan lebih lanjut Menghimbau Puskesmas untuk melanjutkan kelas ibu hamil
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase bayi dengan BBLR	2,50%	540.853.000	11,40%	114.112.620	Terlaksananya Kegiatan Pendampingan oleh dokter spesialis kandungan dan kebidanan, Terlaksananya Kegiatan Kelas Ibu hamil di Desa	kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang resiko tinggi kehamilan dan pentingnya penanganan lebih lanjut	Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran ibu hamil beserta keluarga tentang resiko tinggi kehamilan dan pentingnya penanganan lebih lanjut Menghimbau Puskesmas untuk melanjutkan kelas ibu hamil
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase gedung fasilitas pelayanan kesehatan yang layak	100 %	136.580.443.435	50,00%	25.404.374.661	Tersedianya anggaran APBD TA 2025	Pembangunan dan pengembangan fasilitas kesehatan Masih dalam tahap perencanaan	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Wasting	7 %	8.546.114.700	6,28%	955.904.024	Tersedianya Anggaran APBD untuk PMT dan Vitamin, terlaksananya pemantauan oleh Puskesmas pada balita dengan gizi bermasalah	Pelaksanaan PMT masih dalam proses	Menghimbau agar PMT Lokal di Puskesmas terlaksana dan PMT APBD tersalurkan sesuai dengan sasaran
		Persentase desa yang mencapai ODF	76 %		86,62 %		Adanya Bantuan dana CSR yang dialokasikan untuk pembangunan Jamban Keluarga	Adanya Masyarakat/Keluarga yang tinggal di daerah sufit atau berpindah pindah, sehingga bantuan pembangunan jamban sulit direalisasikan untuk keluarga tersebut	Mengupayakan supaya dana CSR tetap ada untuk pembangunan Jamban Keluarga bagi Keluarga yang masih belum memiliki Jamban Keluarga
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks SPM Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	0,33	5.785.297.100	0,9	1.272.906.624	SPM Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa 1. Mobilisasi Posbindu PTM sudah dilaksanakan oleh sebagian besar Posbindu di Desa sehingga dapat meningkatkan penduduk yang memiliki keterbatasan akses lokasi yang menjadi layanan 2. Petugas imunisasi sudah terlatih 3. Ketersediaan vaksin dan rantai dingin yang terjaga 4. Sistem pencatatan dan pelaporan, antara lain: 1. Sistem deteksi dini dan respon sudah aktif dari semua fasyankes sehingga dapat mendeteksi penyakit berpotensi KLB 2. Patugas laboratorium di setiap fasyankes aktif untuk pengambilan spesimen pasien suspek berpotensi KLB	SPM Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV 1. Beberapa kegiatan pertemuan yang sudah direncanakan baru beberapa yang terlaksana (yang menghadirkan narasumber luar lokal). Hal ini dikarenakan kepadatan jadwal kegiatan lapangan 2. Suntikan genda pada bayi menyebabkan lambatnya cakupan, karena masih banyak orang tua yang tidak mau anaknya disuntik genda, sehingga kecepatan dalam mencapai IDL menjadi lambat yang memengaruhi lambatnya juga tercapai desa UCI 3. masih kurangnya dukungan dari tokoh agama dalam hal pentingnya imunisasi	SPM Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV 1. Pada triwulan III tahun 2025 sudah dijadwalkanbeberapa agenda pertemuan program HIV diantaranya sosialisasi viral load HIV dan sosialisasi peningkatan capaian program HIV 1.terus menerus memberikan KIE kepada orang tua dan masyarakat tentang imunisasi dan amannya suntikan genda pada bayi 2.terus menerus melakukan pendekatan untuk dukungan imunisasi dari tokoh agama
		Cakupan Desa UCI	82		51				
		Persentase deteksi dini dan respon penyakit potensial KLBWabah	100%		100			1. belum tersedia transportasi operasional Penyelidikan Epidemiologi kasus berpotensi KLB 2. Spesimen carier belum tersedia cukup di kabupaten untuk pengiriman spesimen ke laboratorium rujukan	1. Mengusulkan Penganggaran untuk transportasi operasional Penyelidikan Epidemiologi (PE) 2. Mengusulkan penganggaran untuk pembelian/pengadaan spesimen carier
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio SDM Kesehatan (9 Jenis Nakes Wajib di FKTP_(Dokter)	22 Dok	14.062.271.300	32,7	5.140.345.957	9 nakes esensial sudah terpenuhi pada 12 puskesmas	Jumlah nakes esensial sudah terpenuhi akan tetapi ada puskesmas yang masih kurang dari sisi jumlah tenaga yang dibutuhkan	menyusun kebutuhan di aplikasi Sisdmk agar bisa menambah tenaga sesuai kebutuhan melalui jalur pengangkatan CPNS atau P3K
		Persentase SDM Kesehatan yang Bersertifikasi	100 %		100		Tersedianya anggaran APBD TA 2025 dan terlajaknya kerjasama dengan Bapelkes Dinkes Prov Kaltel	Anggaran yang hanya terseda pada APBD perubahan sehingga jadwal dan kegiatan pelatihan tidak dapat segera dilaksanakan	Koordinasi sudah dilaksanakan dengan Bapelkes dan tindak lanjut mempersiapkan peserta sesuai kebutuhan
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek, dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	100%	491.315.000	100%	55.919.000	Tersedianya anggaran TA 2025 dan Terjalannya koordinasi yang baik antar SKPD terkait	Pada saat pembinaan dan pengawasan terkadang ditemui fasilitas pelayanan kefarmasian yang sedang tutup sehingga perlu dilakukan koordinasi dengan PSA/PJ untuk dilakukan kunjungan	Mengupayakan koordinasi yang baik dengan SKPD terkait untuk proses pemenuhan standar dan perizinan sarana pelayanan kefarmasian
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Keluarga yang Melaksanakan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	65%	836.150.900	0,0%	76.084.200	Tersedia Anggaran survei PHBS Tahun 2025 secara online dan offline. Sebagian besar wilayah kerja Puskesmas sdh menggunakan aplikasi dalam pengumpulan data PHBS sehingga lebih mudah dalam rekapitulasi hasil dibandingkan penggunaan form manual yang harus direkap lagi oleh pengumpul data. Selain itu KIE menggunakan berbagai saluran media, baik media cetak dan elektronik juga sudah dilakukan sebagai upaya penyebaran informasi kesehatan khususnya yang terkait Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.	Survei PHBS Rumah Tangga masih blm dilakukan sampai TW 2 dikarenakan belum dilakukan sosialisasi penggunaan aplikasi dan form manual sehubungan adanya beberapa penyesuaian definisi operasional pada 10 indikator PHBS di Rumah Tangga, sebagian kecil wilayah kerja Puskesmas masih terkendala jaringan internet sehingga tidak bisa melakukan pengumpulan data secara online menggunakan aplikasi. Daerah yang terkendala jaringan hanya menggunakan form manual yang harus dirput lagi menggunakan aplikasi di saat pengumpul data sudah berada di daerah yang mempunyai jaringan internet	Survei akan dilaksanakan pada TW 3 dengan 2 metode (online menggunakan aplikasi dan offline menggunakan form manual) menyesuaikan dengan jangkauan sinyal di wilayah kerja Puskesmas. Sosialisasi kepada Pengelola Promkes Puskesmas sudah dilakukan pada awal Juli
12	Dinas Sosial								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	76.51 Nilai	12.961.695.300	0 Nilai	4.097.239.226	Tersedianya anggaran TA 2025 dan Terjalannya koordinasi yang baik antar SKPD terkait	Pada saat pembinaan dan pengawasan terkadang ditemui fasilitas pelayanan kefarmasian yang sedang tutup sehingga perlu dilakukan koordinasi dengan PSA/PJ untuk dilakukan kunjungan	Mengupayakan koordinasi yang baik dengan SKPD terkait untuk proses pemenuhan standar dan perizinan sarana pelayanan kefarmasian
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Yang Aktif	87 %	11.446.700.000	0%	295.519.000	Tersedia Anggaran survei PHBS Tahun 2025 secara online dan offline. Sebagian besar wilayah kerja Puskesmas sdh menggunakan aplikasi dalam pengumpulan data PHBS sehingga lebih mudah dalam rekapitulasi hasil dibandingkan penggunaan form manual yang harus direkap lagi oleh pengumpul data. Selain itu KIE menggunakan berbagai saluran media, baik media cetak dan elektronik juga sudah dilakukan sebagai upaya penyebaran informasi kesehatan khususnya yang terkait Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.	Survei PHBS Rumah Tangga masih blm dilakukan sampai TW 2 dikarenakan belum dilakukan sosialisasi penggunaan aplikasi dan form manual sehubungan adanya beberapa penyesuaian definisi operasional pada 10 indikator PHBS di Rumah Tangga, sebagian kecil wilayah kerja Puskesmas masih terkendala jaringan internet sehingga tidak bisa melakukan pengumpulan data secara online menggunakan aplikasi. Daerah yang terkendala jaringan hanya menggunakan form manual yang harus dirput lagi menggunakan aplikasi di saat pengumpul data sudah berada di daerah yang mempunyai jaringan internet	Survei akan dilaksanakan pada TW 3 dengan 2 metode (online menggunakan aplikasi dan offline menggunakan form manual) menyesuaikan dengan jangkauan sinyal di wilayah kerja Puskesmas. Sosialisasi kepada Pengelola Promkes Puskesmas sudah dilakukan pada awal Juli
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang terpulihkan fungsi sosialnya	100 %	2.527.587.100	100%	198.516.000			
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang terpenuhi perlindungan sosialnya	73 %	8.041.121.400	0%	1.283.674.000			
		Persentase data PPKS yang valid	60 %		0%				
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang terpulihkan kembali	100 %	867.754.900	100%	99.531.803			

	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase makam pahlawan dalam kondisi baik	100 %	126.740.000	100%	3.000.000			
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	76 Predikat	13.293.074.098	0 Predikat	6.274.783.734			
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	94,95	Rp2.675.111.860	0 Persen	874.208.386	Kerjasama Pustakawan	Pustakawan yang tidak memenuhi data yang diminta	Pembinaan
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Cakupan Peningkatan Koleksi Nasional dan Naskah Kuno Yang Dilestarikan	1	Rp541.929.150	75%	98.000.000	Kerjasama Masyarakat	Masyarakat yang tidak membentuhkan naskah kuno yang dimiliki	Koordinasi
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Revitalisasi Arsip dan Aktualisasi Nilai Budaya dan Kearifan Lokal	100%	1.331.324.600	75%	245.238.000	Mulai tumbuhnya kesadaran SKPD akan pentingnya pengelolaan arsip	Sarana dan Prasarana yang masih kurang memadai	koordinasi dengan atasan
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Daerah	100 Persen	694.964.600	75%	308.411.566			
	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Prosentasi Pelayanan Perizinan dan Penggunaan Arsip	100%	44.828.400	0%	0	Arsip yang tersedia untuk di akses oleh pengguna	jejaring server nasional yang seringkali mengalami gangguan	Menunggu tindak lanjut perbaikan dari pusat (ANRI)
14	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74 Point	18.347.522.870	72.75 Point	5.980.932.362	Tersedianya Anggaran sesuai kebutuhan, Terlaksananya Monitoring secara berkala	- Terbatasnya SDM berkompeten yang tersedia pada sub bagian perencanaan dan pelaporan - Terbatasnya sumber daya manusia yang memahami proses perencanaan dan pelaporan baik dalam menyusun dokumen perencanaan SKPD ataupun proses penyusunan laporan kinerja	- Penambahan SDM di sub bagian perencanaan dan pelaporan - Pelatihan dan sosialisasi yang terkait dengan perencanaan
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	100 Persen	178.000.000	25 Persen	0	Tersedianya Anggaran sesuai kebutuhan, Terlaksananya Monitoring secara berkala	- belum ada regulasi dalam bentuk peraturan daerah dan peraturan kepala daerah - belum ada SOP mengenai izin membuka tanah - masih banyak tanah pemerintah daerah yang belum sertifikat tanah	- pengajuan Ranperda kepada Bupati Balingan melalui Bagian Hukum Setda - penyusunan draft SOP mengacu kepada Ranperda
	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	100 Persen	20.000.000	25 Persen	0	Tersedianya Anggaran sesuai kebutuhan, Terlaksananya Monitoring secara berkala	- belum ada MoU antara Pemkab Balingan dengan Kantor Pertanahan - berkas administrasi pada jaman dahulu belum terdokumentasikan dengan baik	- Melakukan komunikasi dan inisiasi untuk penyusunan MoU - Melakukan survey dan pendataan ke lokasi-lokasi transmigrasi - melakukan koordinasi dengan pihak terkait
	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	PERSENTASE PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	100 Persen	776.000.000	50 Persen	66.113.500	Tersedianya Anggaran sesuai kebutuhan, Terlaksananya Monitoring secara berkala	- belum ada regulasi dalam bentuk peraturan daerah dan peraturan kepala daerah - belum ada SOP mengenai izin membuka tanah - masih banyak SKPD yang tidak memiliki SDM yang memadai untuk melaksanakan pengadaan tanah	- pengajuan Ranperda kepada Bupati Balingan melalui Bagian Hukum Setda - penyusunan draft SOP mengenai SOP Perencanaan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil - intensifikasi pembuatan sertifikat tanah aset Pemerintah Daerah
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Penatagunaan tanah pemerintah daerah	100 Persen	785.999.500	50 Persen	35.025.000	Tersedianya Anggaran sesuai kebutuhan, Terlaksananya Monitoring secara berkala	- belum ada regulasi mengenai indeks penatagunaan tanah - belum ada SOP daerah mengenai perencanaan dan pelaksanaan pengadaan tanah - masih banyak SKPD yang tidak memiliki SDM yang memadai untuk melaksanakan pengadaan tanah	- penyusunan indeks penatagunaan tanah - penyusunan draft Rancangan Perlembag mengenai SOP Perencanaan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil - pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM dalam perencanaan dan pelaksanaan pengadaan tanah
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup	100 Persen	1.523.134.000	50 Persen	44.696.500	Tersedianya Anggaran sesuai kebutuhan, Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi kegiatan secara berkala	- Terbatasnya SDM berkompeten yang tersedia pada setiap sub kegiatan di bidang tata lingkungan hidup	- Penambahan SDM di setiap sub kegiatan di bidang tata lingkungan hidup - Pelatihan dan sosialisasi yang terkait dengan kegiatan di bidang tata lingkungan hidup
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Status Mutu Lingkungan Hidup	100 Persen	2.264.998.900	50 Persen	342.579.500	Tersedianya Anggaran sesuai kebutuhan, Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi kegiatan secara berkala	- Terbatasnya SDM berkompeten yang tersedia pada setiap sub kegiatan di bidang pengendalian, pencemaran pengelolaan limbah dan kerusakan LH	- Penambahan SDM di setiap sub kegiatan di bidang pengendalian, pencemaran pengelolaan limbah dan kerusakan LH - Pelatihan dan sosialisasi yang terkait dengan kegiatan di bidang pengendalian, pencemaran pengelolaan limbah dan kerusakan LH
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Peningkatan Keanekaragaman Hayati	100 Persen	10.195.934.500	50 Persen	1.038.055.388	Tersedianya Anggaran sesuai kebutuhan, Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi kegiatan secara berkala	- Terbatasnya SDM berkompeten yang tersedia pada setiap sub kegiatan di bidang tata lingkungan hidup - masih terbatasnya pejabat yang bersertifikat pengadaan barang/jasa	- Penambahan SDM di setiap sub kegiatan di bidang tata lingkungan hidup - Pelatihan dan sosialisasi yang terkait dengan kegiatan di bidang tata lingkungan hidup
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Penurunan Jumlah Limbah B3	100 Persen	50.000.000	50 Persen	1.985.000	Tersedianya Anggaran sesuai kebutuhan, Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi kegiatan secara berkala	- Terbatasnya SDM berkompeten yang tersedia pada setiap sub kegiatan di bidang pengendalian, pencemaran pengelolaan limbah dan kerusakan LH	- Penambahan SDM di setiap sub kegiatan di bidang pengendalian, pencemaran pengelolaan limbah dan kerusakan LH - Pelatihan dan sosialisasi yang terkait dengan kegiatan di bidang pengendalian, pencemaran pengelolaan limbah dan kerusakan LH
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan	100 Persen	500.000.000	50 Persen	43.955.500	Tersedianya Anggaran sesuai kebutuhan, Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi kegiatan secara berkala	- Terbatasnya SDM berkompeten yang tersedia pada setiap sub kegiatan di bidang penataan LH	- Penambahan SDM di setiap sub kegiatan di bidang penataan LH - Pelatihan dan sosialisasi yang terkait dengan kegiatan di bidang penataan LH
	PROGRAM PENGUKUHAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase MHA yang diakui terkait dengan PPLH	100 Persen	49.999.300	25 Persen	933.000	Tersedianya Anggaran sesuai kebutuhan, Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi kegiatan secara berkala	- Terbatasnya SDM berkompeten yang tersedia pada setiap sub kegiatan di bidang tata lingkungan hidup	- Penambahan SDM di setiap sub kegiatan di bidang tata lingkungan hidup - Pelatihan dan sosialisasi yang terkait dengan kegiatan di bidang tata lingkungan hidup
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100 Persen	109.940.900	50 Persen	23.000.000	Tersedianya Anggaran sesuai kebutuhan, Terlaksananya Monitoring secara berkala.	- Terbatasnya SDM berkompeten yang tersedia pada setiap sub kegiatan di Bidang Pengelolaan Persampahan	- Penambahan SDM di setiap sub kegiatan di Bidang Pengelolaan Persampahan - Pelatihan dan sosialisasi yang terkait dengan kegiatan di Bidang Pengelolaan Persampahan - Peningkatan dan Pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan untuk kegiatan penilaian Adiwiyata, Program Kampung Iklim, Perkantoran Ramah Lingkungan dan Adipura
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100 Persen	75.000.000	50 Persen	25.709.000	Tersedianya Anggaran sesuai kebutuhan, Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi kegiatan secara berkala	- Terbatasnya SDM berkompeten yang tersedia pada setiap sub kegiatan di bidang penataan LH	- Penambahan SDM di setiap sub kegiatan di bidang penataan LH - Pelatihan dan sosialisasi yang terkait dengan kegiatan di bidang penataan LH
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	99 Persen	9.964.743.600	50 Persen	3.026.377.195	Tersedianya Anggaran sesuai kebutuhan, Terlaksananya Monitoring secara berkala,	- Terbatasnya SDM berkompeten yang tersedia pada setiap sub kegiatan di Bidang Pengelolaan Persampahan - masih terbatasnya pejabat yang bersertifikat pengadaan barang/jasa	- Penambahan SDM di setiap sub kegiatan di Bidang Pengelolaan Persampahan - Pelatihan dan sosialisasi yang terkait dengan kegiatan di Bidang Pengelolaan Persampahan - Peningkatan dan Pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan
15	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74.4 Nilai	12.396.611.355,00	0 nilai	5.386.120.205,00	(1) regulasi yang jelas, seperti PermenPANRB No. 29/2010 dan Perda yang mengatur pengukuran kinerja; (2) kepemimpinan yang kuat dari bupati/walikota dan komitmen OPD dalam menyusun indikator kinerja; (3) kapasitas SDM yang memadai melalui pelatihan dan keberadaan Tim SAKIP; (4) dukungan teknologi, seperti aplikasi e-SAKIP dan integrasi data dengan SIPD; serta (5) partisipasi publik dan pengawasan melalui transparansi LKJ dan peran BPK/BPKP. Selain itu, anggaran yang memadai untuk program kinerja juga menjadi pendorong penting	1) pemahaman aparatur yang lemah tentang SAKIP, termasuk indikator kinerja yang tidak realistis; (2) keterbatasan SDM dan anggaran, terutama di daerah dengan sumber daya terbatas; (3) masalah teknologi, seperti sistem e-SAKIP yang tidak terintegrasi atau data yang tidak akurat; (4) birokrasi rumit dan koordinasi antar-OPD yang buruk; serta (5) rendahnya akuntabilitas, misalnya laporan kinerja yang sekadar formalitas tanpa tindak lanjut. Faktor eksternal seperti bencana alam atau perubahan kebijakan pusat juga dapat menghambat pencapaian SAKIP	Untuk mengoptimalkan nilai SAKIP, pemerintah daerah perlu memperkuat sosialisasi dan pelatihan bagi aparatur guna meningkatkan pemahaman tentang penyusunan indikator kinerja yang realistis, meningkatkan integrasi sistem teknologi seperti e-SAKIP dan basis data terpadu untuk memastikan akurasi dan kemudahan pemantauan, serta memperkuat koordinasi antar-OPD melalui rapat berkala dan penerjemahan prosedur linierisasi. Selain itu, penguatan pengawasan internal dan eksternal oleh inspektorat dan BPK/BPKP, serta transparansi publikasi laporan kinerja, akan mendorong akuntabilitas. Pemberian insentif bagi OPD berkinerja tinggi dan sanksi bagi yang tidak memenuhi target juga diperlukan untuk menciptakan budaya kerja berorientasi hasil. Dengan langkah-langkah konkret ini, nilai SAKIP dapat meningkat secara signifikan

	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Keselarasan Muatan RKPD dengan muatan RPJMD	100 %		3.587.595.900,00	50%	650.365.298,00	-Adanya pedum RKPD 2026 dan Inmen tentang RPJMD 2025-2029 yang terbit lebih awal sehingga dapat menjadi acuan dan memudahkan penyusunan RKPD 2025 Perubahan, RKPD 2026 dan RPJMD 2025-2029 - Dukungan semua SKPD sehingga dalam pelaksanaan Penilaian Mandiri SPIP bisa tepat waktu	Adanya penyusunan dokumen perencanaan berbarengan yang secara paralel harus disusun dan dilakukan percepatan mulai dari RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja Murni dan Perubahan	Adanya pembagian tugas dan timeline perencanaan yang jelas dan ketat sehingga semua dokumen perencanaan bisa terselesaikan
		Persentase Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional	100 %			60%				
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Nilai Baik bidang ekonomi dan infrastruktur	95 %	5.175.405.800,00	0%	763.463.111,00	1. koordinasi dengan SKPD teknis telah terlaksana dengan baik 2. asistensi dan verifikasi dokumen perencanaan SKPD telah terlaksana dengan baik 3. monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan SKPD berjalan efektif dan relevan.	1. Keterbatasan sumber daya dan waktu dapat mengurangi kinerja perencanaan 2. Kurangnya data dan informasi dari SKPD yang relevan	Mengoptimalkan kegiatan dilaksanakan baik secara tatap muka maupun daring dalam pelaksanaan pemenuhan data dukung maupun informasi penting lainnya terkait dokumen perencanaan urusan perekonomian, SDA dan infrastruktur serta kewilayahan.	
		Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Nilai Baik bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	95 %			0%				
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100 %	7.335.942.500,00	0%	2.962.992.790,00	-Tingginya kesadaran kepala daerah dalam berinovasi -Pernyataan Komitmen pengambil kebijakan dalam menerapkan Culture Of Innovation -Adanya inovasi Sepeda Baru (Sistem penjarangan Inovasi daerah Balangan terpadu) yang memudahkan basis data inovasi, kegiatan sosialisasi dan penjarangan inovasi -Inovasi jemput bola penjarangan dan pendampingan inovasi ke semua SKPD, RSUD, dan UPT Puskesmas -Penambahan alokasi anggaran inovasi untuk pelaksanaan pendampingan, bimbingan teknis, pemberian reward berupa uang pembinaan dan hadiah umroh -Melaksanakan Diseminasi dan Gallery Walk Inovasi bidang Kesehatan -Pelaksanaan penjarangan inovasi sekolah dan masyarakat -Peran tim klinik inovasi dan tim akselerasi inovasi daerah untuk mendorong dan percepatan pemenuhan data dukung inovasi -Pendataan HAKI untuk setiap inovasi sehingga menjadi nilai tambah -Bertambahnya intensitas kegiatan bimbingan teknis inovasi -dukungan kebijakan pimpinan, kebijakan pembangunan berbasis hasil kajian/ riset -dukungan anggaran penelitian dan pengembangan -terjalannya kolaborasi antar OPD mendukung pemberian informasi/ data sekunder dan primer, dan pemanfaatan hasil kelitbangan -dukungan sumber daya yang kompeten yakni mitra Lembaga, Yayasan dan perguruan tinggi -pelaksana penelitian dan pengembangan (akademisi berpengalaman dan berkualifikasi) -terdapatnya 2 orang SDM peneliti -pendaftaran publikasi jurnal dari hasil penelitian yang telah dilakukan	-Pengadministrasian inovasi masih perlu ditingkatkan lagi -Sarana dan prasarana inovasi masih kurang -Rendahnya penjarangan dan pelaporan inovasi dari desa, DPRD, dan UMKM -Dinamisnya pergantian pamong dan admin inovasi -Kemampuan pengumpulan data dukung dan pelaporan inovasi oleh innovator dan admin inovasi masih perlu ditingkatkan lagi -rencana aksi dan implementasi dari RPJ-IPTEK -masih terbatasnya hasil perekayasaan dan penerapan terkait pengembangan komoditas unggulan (belum tersusunnya kajian Produk Unggulan Daerah dan Indikasi Geografis) -tema dan topik kajian dan penelitian belum mewakili isu strategis dan permasalahan daerah yang mendasak memerlukan penanganan dan penyelesaian -masih terbatasnya kapasitas dan kapabilitas pejabat fungsional peneliti	-Optimalisasi metode penjarangan inovasi secara terpadu yang didukung oleh pemangku kebijakan dan stakeholder melalui sosialisasi ke semua SKPD dan FGD konfirmasi inovasi oleh admin inovasi. -Upgrade wadah pelaporan inovasi (aplikasi sinovda) yang berfungsi untuk menghimpun inovasi/ basis data. -Melakukan diseminasi digital melalui media online, website/aplikasi dan cetak secara intensif. -Melakukan diseminasi inovasi melalui media cetak kepada masyarakat dan UMKM -Memberikan dukungan anggaran yang cukup bagi pengembangan inovasi serta dukungan sarana prasarana yang memadai. -Memfasilitasi bimbingan teknis, workshop dan sosialisasi-sosialisasi terkait data dukung, penyusunan profil, video, HKI, tematik inisiator inovasi -Menjaring inovasi dari masyarakat, desa, DPRD, UMKM -legalisasi dokumen RIP-IPTEK -mengusulkan peneliti dan tenaga pelaksana teknis penelitian dan pengembangan pada kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis dan diklat pelatihan -melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkelanjutan terhadap terkait pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79 Nilai	15.644.221.978	-	6.349.450.591	- Kegiatan dilaksanakan sesuai anggaran kas yang telah ditetapkan	- Beberapa kegiatan pengadaan barang jasa terkendala karena SDM belum memahami sistem pengadaan E Katalog Versi 6	- Melaksanakan sosialisasi pengadaan dengan e katalog versi 6 untuk para PPTK dan ASN yang meurusi pengadaan	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEMUDAAN	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan yang aktif, pemuda pelopor dan persentase wirausaha muda	35 %	1.741.044.400	20%	1.478.211.400	- Kegiatan dilaksanakan sesuai anggaran kas yang telah ditetapkan	- Masih ada beberapa kegiatan yang kekurangan anggaran akibat efisiensi	- Pengajuan penambahan anggaran pada APBD Perubahan 2025	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Cabor yang Berprestasi	70 %	18.429.872.500	30%	1.634.409.361	- Kegiatan Kejurprov dan POPDA terlaksana sesuai anggaran kas yang ditentukan		- Melaksanakan Muslub untuk pemilihan Ketua Organisasi yang baru - Mempercepat proses pencairan dana hibah KONI	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase organisasi kepramukaan yang aktif	100 %	344.212.000	50%	255.820.000	- Kegiatan Kepramukaan dilaksanakan sesuai anggaran kas yang telah ditetapkan			
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Wisata yang mempunyai Daya Tarik	80 %	2.701.212.518	30%	514.242.655	- Kegiatan pelatihan pokdarwis sudah terlaksana 2x dari 4x yang direncanakan - untuk kegiatan fisik semua juga sudah berproses	- Proses realisasi keuangan menunggu kemajuan laporan penyelesaian pengadaan fisik	- Mempercepat proses pelaksanaan kegiatan fisik	
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Cakupan promosi pariwisata	20 Persen	2.408.263.300	10	444.153.493	- Kegiatan COE dan pemilihan Putpar sudah selesai dilaksanakan	- Kegiatan event besar masih dalam tahap perencanaan yang akan dilaksanakan pada Bulan Agustus	- Segera menyusun RAB pelaksanaan kegiatan di Bulan Agustus tersebut	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase peningkatan kelompok ekonomi kreatif dan Persentase Produk Kreasi Unggulan	30 %	1.430.354.600	10%	44.128.062	- Beberapa kegiatan lomba ekonomi kreatif sudah terlaksana sesuai anggaran kas yang ditetapkan	- Kegiatan ekraf selanjutnya masih dalam proses penyusunan SPJ kegiatan	- Segera melaksanakan kegiatan yang lain sesuai angkas yang telah ditetapkan - melakukan monitoring dan evaluasi	
17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72,5	299.168.964.746	0	86.915.056.700	-	Nilai Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2024 belum dikeluarkan oleh inspektorat	Menunggu nilai Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dari inspektorat	
		Nilai IKM Perangkat Daerah	86		89,21		-			
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	77,87	277.066.820.475	76,59	46.654.141.973	Capaian yang ada merupakan capaian dari tahun 2024 karena penghitungan indikator pendidikan dilakukan pada tahun ajaran sekolah yang dimulai pada bulan Juli berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya. Adapun faktor pendukungnya adalah : 1. Adanya peningkatan Infrastruktur dimana Pemerintah membangun dan memperbaiki fasilitas pendidikan PAUD di berbagai daerah, terutama di daerah terpencil, untuk memastikan anak-anak memiliki akses ke pendidikan sejak dini. 2. Adanya program-program pemerintah seperti Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD membantu penyelenggara pendidikan untuk memberikan layanan pendidikan berkualitas dengan biaya yang terjangkau. 3. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya pendidikan anak usia dini, yang memotivasi orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka pada usia yang lebih muda. 4. Adanya peningkatan kompetensi tenaga pendidik PAUD melalui pelatihan dan sertifikasi meningkatkan kualitas pendidikan yang diterima anak-anak	- Masih terdapat Penduduk Usia 5 – 6 tahun yang ikut orang tua kerja di luar Kabupaten Balangan (sekolah di luar kabupaten) - Terdapat penduduk usia 5 – 6 tahun yang mengikuti pendidikan di Sekolah atau Satuan Pendidikan kabupaten tetangga yang berbatasan langsung dengan kabupaten Balangan	Melakukan sosialisasi ke tingkat kecamatan atau bahkan di tingkat kelurahan atau Desa yang berbatasan langsung dengan kabupaten tetangga agar tingkat kesadaran masyarakat meningkat dan juga Tenaga Pendidik (pendidik yang domisili desa tersebut) melakukan pendataan anak usia sekolah di wilayah atau lingkungan satuan pendidikan	
		APK SD/ sederajat	99,52		103,99		Adanya program Kartu Balangan Pintar dan Basiwa berprestasi serta peningkatan sarana prasarana pendidikan	Program Kartu Balangan Pintar belum dapat membantu semua peserta didik yang rentan putus sekolah dan yang berasal dari keluarga kurang mampu	Melanjutkan program penyaluran beasiswa prestasi dan program Kartu Balangan Pintar (KBP) dan peningkatan jumlah penerima manfaat program KBP	
		APM SD/ sederajat	92,35		92,16					

		APK SMP/ sederajat	83.24		105.85					
		APM SMP/ sederajat	67.13		67					
		Angka melanjutkan SD ke SMP	79.77		81.32					
		Angka melanjutkan SMP ke SMA	99.01		88.64					
		Persentase ketersediaan kelompok belajar pada PKBM kecamatan	100		100					1. Peningkatan Aksesibilitas yakni meningkatkan akses ke lembaga pendidikan kesetaraan, baik secara fisik (mendirkan lebih banyak pusat pendidikan di daerah terpencil) maupun secara teknologi (memanfaatkan pembelajaran online atau jarak jauh). 2. Penyuluhan dan Sosialisasi dengan melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan kesetaraan, khususnya di kalangan kelompok yang terpinggirkan, seperti pekerja anak atau penyandang disabilitas. 3. Pemberian Bantuan atau Subsidi dengan menyediakan bantuan biaya pendidikan untuk peserta didik yang kurang mampu, sehingga mereka dapat mengikuti pendidikan dengan lebih mudah. 4. Pelatihan untuk tutor yakni meningkatkan kualitas pengajaran dengan melatih para tutor di pendidikan kesetaraan agar dapat memberikan pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Nilai rata-rata literasi SD	69.61		61.36		-			
		Nilai Rata-rata Literasi SMP	73.13		46.15		-			
		Nilai rata-rata numerasi SD	52.51		57.39		-			
		Nilai Rata-rata Numerasi SMP	66.01		42.51		-			
		Indeks iklim keamanan SD	78.66		90.91		-			
		Indeks iklim keamanan SMP	78.74		92.31		-			
		Indeks iklim kebhinekaan SD	79.15		82.39		-			
		Indeks iklim kebhinekaan SMP	77.43		57.69		-			
		Indeks iklim inklusivitas SD	62.72		74.43		-			
		Indeks iklim inklusivitas SMP	63.2		80.77		-			
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Nilai Rata-Rata Literasi SD	69.61	699.756.600	61.36	0,00	-			
		Nilai Rata-Rata Literasi SMP	73.13		46.15		-			
		Nilai Rata-Rata Numerasi SD	52.51		57.39		-			
		Nilai Rata-Rata Numerasi SMP	66.01		42.51		-			
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Kompeten	65%	6.027.872.200	65%	542.195.135	-			
		Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD yang Kompeten	22.41 %		23%		-			
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Jenjang PAUD dan Non Formal yang Diupdate Perizinannya	100%	179.141.000	100%	0,00	-			
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Lembaga Adat yang Dibina Dengan Baik	72%	673.750.000	72%	7.360.000	-			
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	93.33 %	7.640.588.240	86.67%	667.960.942	-			
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase sejarah lokal yang dilestarkan	80%	1.643.945.800	72.78%	215.197.652	-			

	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase kegiatan pelestarian cagar budaya	86.67 %	2.877.218.200	86.67 %	255.509.100	Tersedianya Anggaran sesuai kebutuhan	Tidak ada hambatan yang berarti	Terus melakukan koordinasi kepada TACB pelestarian dan Peneliti BRIN untuk melakukan kajian mendalam terkait objek cagar budaya serta berkoordinasi dengan juru pelihara
18	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	100 %	11.434.665.545	45 %	4.373.515.658	Tersedianya Anggaran sesuai kebutuhan	Keterbatasan infrastruktur terutama daerah terpencil, kurang nya kesadaran masyarakat dalam pengaduan	Peningkatan infrastruktur TIK di daerah blank spot
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Badan Publik yang Informatif	67 %	6.970.834.852	57,58 %	3.382.075.976	Koordinasi dengan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang ada di SKPD	Kurangnya anggaran khusus asistensi, pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap keterbukaan informasi publik pada SKPD	Penambahan anggaran perubahan untuk melaksanakan asistensi, pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap keterbukaan informasi publik pada SKPD
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Kematangan Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik	100 %	6.970.834.852	45 %	0	tersedianya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan, Penambahan SDM sebagai tenaga JF Prakom Ahli Muda atau dikembalikan ke jabatan struktural, 1 orang sebagai penanggung jawab tata kelola dan 1 orang sebagai infrastruktur.	anggaran terlalu mengarah pada kegiatan infrastruktur yang seharusnya juga dimbangi dengan koordinasi dengan kementerian pemangku kebijakan. Sumber Daya Manusia TIK yang kompeten dalam hal pemahaman Penerjemahan Regulasi kedalam implementasi, karena yang diperlukan 2 Orang JF Prakom Ahli Muda Atau dikembalikan Ke jabatan Struktural seperti daerah lain.	-peningkatan kapasitas SDM; - Pengusulan Pengembalian Jabatan struktural atau penambahan JF Prakom Ahli Muda - Komitmen pimpinan serta perubahan mindset
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data sektoral yang terakses menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	714.606.900	45 %	7.650.000	Penambahan SDM ASN statistisi	Kesenjangan Keterampilan Teknis (Skill Gap) dalam Penguasaan Software Statistik terkini (seperti R, Python, SAS, SPSS) dan perangkat pengolahan data besar, serta visualisasi data informatif	- Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan SDM stitistisi penguasaan software statistik sesuai perkembangan jaman; - Memaksimalkan penggunaan anggaran; - Merencanakan penambahan anggaran dalam pengembangan portal data daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Gangguan yang Terselamatkan	100	555.122.500	5 Laporan	17.370.000	Tersedianya Anggaran sesuai kebutuhan, Terlaksananya pemantauan serta pengawasan keamanan website secara berkala	- Belum maksimalnya dalam melaksanakan pemantauan dan pengawasan keamanan website	- Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan SDM Sandiman dalam pelatihan cyber security - Merencanakan Penambahan anggaran dalam penyediaan peralatan keamanan jaringan berupa firewall - Memaksimalkan penggunaan anggaran
19	DINAS PERHUBUNGAN								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja	78.25	12.931.124.800	-	2.345.147.245	-	-	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase wilayah (desa/kecamatan) yang terlayani moda transportasi	100%	26.165.062.950	90%	5.621.527.461	- dukungan dari pemerintah kabupaten untuk pemenuhan armada angkutan	- masih ada desa/daerah yang aksesnya blm dilalui angkutan/sarana transportasi	
		Jumlah pelanggaran moda transportasi	11 Kejadian		-				- blm ada pelaksanaan Gakum
		Persentase jalan yang tertib manajemen lalu lintas	100%		100%		- penambahan SDM pengatur lalu lintas		
		Persentase moda transportasi yang laik jalan	95%		50%		- peraturan terbaru menerapkan biaya gratis uji	- Kurangnya edukasi untuk Masyarakat belum memahami pentingnya uji KIR untuk keselamatan	- Sosialisasi bahwa uji KIR bukan soal biaya, tetapi soal keselamatan
20	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	76.51 persen	13.266.793.178	17.5 persen	6.376.975.965	Adanya dukungan dan komitmen dari pimpinan, adanya perencanaan kinerja yg baik, adanya pelaporan kinerja yang transparan dan informatif serta adanya peran aparat pengawas internal Pemerintah	Sumber daya manusia yang terbatas, Anggaran blm sepenuhnya berbasis kinerja serta masalah teknologi tidak terintegrasi	Optimalisasi Pelaporan Kinerja, Penambahan SDM sesuai kebutuhan serta pemerintah daerah perlu memperkuat sosialisasi dan pelatihan bagi aparatur guna meningkatkan pemahaman tentang penyusunan indikator kinerja yang realistik, meningkatkan integrasi sistem teknologi seperti e-SAKIP dan basis data terpadu untuk memastikan akurasi dan kemudahan pemantauan,
		Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik	100 Persen		17.5 persen		Adanya komitmen pimpinan dukungan dari pimpinan dalam penataan aset secara tertib dan transparan, adanya dukungan anggaran tersedianya dana untuk pemeliharaan dan pengamanan aset, SDM yang kompeten, adanya sistem informasi aset yang terintegrasi, adanya evaluasi berkala tentang aset	kurangnya SDM yang kompeten, sistem informasi belum optimal, data aset kurang valid, keterbatasan anggaran khususnya untuk mobil operasional roda 4	Melaksanakan pelatihan berkala tentang pengelolaan aset untuk pegawai, melakukan inventarisasi aset secara menyeluruh, mengusulkan tela'ahan staf untuk pembelian kendaraan operasional roda 4, Adanya fasilitas pendukung berupa laptop dan printer untuk mendukung pelaporan khusus di bagian aset
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG di SKPD/Lembaga/Instansi di Kabupaten	21.15 persen	1.978.426.400	0%	331.029.600	Terbentuknya tim Pokja dan Tim Teknis PUG	beberapa kegiatan dikenakan efisiensi sehingga tidak berjalan maksimal dan sebagian kegiatan menunggu pengeseran anggaran	Melaksanakan kegiatan yang bisa dilaksanakan sesuai angkas yang ada
		indeks pembangunan gender (IPG)	92.83 nilai		0 Nilai				
		indeks pemberdayaan gender (IDG)	75 nilai		0 Nilai				

	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan TIPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0.008	298.998.900	0 Nilai	43.908.000	Pembentukan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di 4 Desa serta pembentukan Relawan SAPA di 4 Desa DRPPA	Anggota relawan SAPA sebagian besar masih belum paham bagaimana perlindungan perempuan dan anak serta tugas dan fungsi relawan SAPA.	Melaksanakan Pelatihan bagi Relawan SAPA
		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	8 orang		0 orang				
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks kualitas keluarga	82.65	561.622.100	0%	122.070.500	telah terbentuknya Tim pencegahan perkawinan usia anak Kab. Balangan	belum optimalnya pelaksanaan rencana aksi pencegahan perkawinan usia anak oleh setiap anggota tim, belum tersedianya anggaran yang cukup dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak	Pengajuan penambahan anggaran di SKPD terkait khususnya yang menjadi anggota tim untuk mendukung upaya pencegahan perkawinan usia anak
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Instansi yang Berkontribusi dalam Penyusunan Data Gender dan Anak	100 persen	129.167.200	0%	25.535.000	telah terbentuknya Tim pengumpul, pengolah dan penyaji data terlah gender dan anak Kab. Balangan	keterlambatan anggota tim dalam menyerahkan data yang diperlukan dalam penyusunan dokumen data terlah gender dan anak	upaya jemput bola dalam mengumpulkan dan menghimpun data ke SKPD terkait
					0 dokumen				
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Desa LAYAK Anak	10.8	840.894.800	0 indeks	150.344.820	Terbentuknya Gugus Tugas Desa LAYAK Anak	Kurangnya fasilitas desa yang mendukung sebagai Desa LAYAK Anak	Melakukan sosialisasi dan advokasi kepada desa mengenai pentingnya desa LAYAK Anak
		Capaian Nilai Kabupaten LAYAK Anak	658 Nilai		0 Nilai		Terlaksananya Penilaian/Evaluasi Kabupaten LAYAK Anak	tingkat kehadiran anggota tim dalam rapat penilaian KLA Rendah	melakukan koordinasi dengan anggota Tim dengan menghubungi secara langsung
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan yang diangani	100 persen	338.200.500	0%	32.479.777	terdapat UPTD PPA	tidak adanya psikolog di kabupaten balangan	melakukan kerjasama dengan psikolog dari kabupaten terdekat diluar balangan
	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Desa Yang Aktif Melakukan Kerjasama	51.63	34.791.784.600	0 Kerjasama	27.598.613.094	Desa-desa yang berdekatan seringkali memiliki kesamaan karakteristik dalam hal geografis, demografis, budaya, dan potensi sumber daya alam atau ekonomi. Kesamaan ini menjadi fondasi kuat untuk membangun kerja sama yang saling menguntungkan	1. Perangkat desa mungkin kekurangan pengetahuan, keterampilan, atau pengalaman dalam mengelola dan melaksanakan program kerja sama. Pelatihan dan pembinaan yang minim dapat memperburuk kondisi ini. 2. Keterbatasan anggaran dana dan Infrastruktur	Jika hal yang akan dikerjakannya belum tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) masing-masing desa, maka perlu dilakukan perubahan RPJM Desa dan RKP Desa sesuai aturan perundang-undangan
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang terbit, transparan, dan akuntabel dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	56.28	12.536.957.640	0%	1.738.366.567	1. regulasi yang jelas 2. koordinasi yang baik antar stake holder	1. Rendahnya kapasitas SDM Aparatur Desa 2. Minimnya anggaran 3. kurangnya partisipasi warga 4. terbatasnya sarana dan prasarana	Penguatan kapasitas aparatur desa
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Desa	94	6.870.768.500	0%	2.012.136.188	Salah satu faktor yaitu kebutuhan dan kepentingan bersama, antarindividu yang dapat mendorong mereka untuk berkumpul dan membentuk suatu wadah	1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia, Kualitas dan kuantitas SDM yang rendah, kurangnya kompetensi, atau tidak memahami tugas dan fungsinya. 2. Serta keterbatasan anggaran dan Sarana dan Prasarana yang kurang memadai	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Indeks Pembangunan Keluarga	66	4.886.974.500	0%	1.505.385.922	1. Tersedianya anggaran dan per kader IMP yang diberdayakan pada 157 kampung KB 2. Dukungan Sekolah dalam pelaksanaan Penyuluhan pendewasaan usia perkawinan 3. Dukungan Desa dalam pengelolaan kampung KB 4. Kegiatan terjadwal dan memaksimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi	1. pelaksanaan kegiatan menyesuaikan jadwal dan aliran kas 2. beberapa kegiatan dikenakan efisiensi sehingga tidak berjalan maksimal	memaksimalkan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai anggaran yang tersedia
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	76	934.351.200	0%	289.558.894	1. Bertambahnya jumlah Tenaga Pemberi pelayanan KB khususnya MKJP (IUD/implant) yang terlatih 2. Adanya Pembinaan Pelayanan KB. 3. Adanya Koordinasi dengan profesi terkait	1. Kurangnya Stock akon di gudang karena permintaan akan akon ini dari faskes tidak terpenuhi (implant satu batang dan pil Kombinasi) sedangkan pasokan akon dari prov belum ada 2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menerima pelayanan KB khususnya KB MKJP	Mengusulkan pemenuhan kebutuhan masyarakat baik terkait pemberian edukasi tentang Keluarga Berencana maupun alat kontrasepsi yang di perlukan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Angka Kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR)	16	1.533.127.800	0,64%	179.308.400			
21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	75.5 Nilai	7.494.642.865	0 Nilai	2.777.900.427	1. Komitmen yang kuat dari Pimpinan dan karyawan OPD 2. Pengawasan dan evaluasi internal untuk meningkatkan kualitas AKIP	1. Kurangnya pemahaman tentang SAKIP 2. Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dalam mengumpulkan data	1. Meningkatkan kualitas data 2. Meningkatkan efektivitas sistem pengawasan dengan memperbaiki proses pengawasan dan evaluasi
		Nilai IKM Perangkat Daerah	85	0	0		Peningkatan dan kompetensi aparatur dalam pelayanan prima dan proses layanan yang sederhana, mudah diakses, tidak berbelit dan transparan akan meningkatkan kepuasan masyarakat	Keterbatasan sumber daya yang berkualitas dan kompeten dalam pelayanan publik serta keterbatasan sarana dan prasarana dalam mendukung kualitas layanan	Pembekalan atau pelatihan pada sumber daya dalam pelayanan serta pembuatan standar layanan untuk dijadikan standar prosedur layanan
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Angka Potensi Konflik Sosial Berlatar Belakang Suku, Rasi/Etnik dan Antar Golongan yang Tertangani	1 Laporan	1.525.469.700	0 Laporan	165.286.446	Koordinasi yang baik dengan lintas Sektor yang ada seperti Forum Pembauran Kebangsaan terutama dalam mencegah munculnya potensi konflik terkait suku/etnik terutama di daerah rawan konflik	1. Fasilitas terkait kegiatan keragaman suku/etnis yang masih kurang. 2. Pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan yang mulai menurun.	Mengusulkan kegiatan terkait peningkatan pemahaman ideologi wawasan kebangsaan dan kebineka tunggal ika
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Parpol yang Aktif	100 %	1.648.576.500	0 %	80.990.800	Terlaksananya Koordinasi dan Kemitraan yang Baik dengan PartaiPolitik Serta Intensifnya Komunikasi antara Badan Kesbangpol dengan Pengurus Harian Partai Politik terutama adanya Faktor Kenakalan Bantuan Keuangan PartaiPolitik	Sulitnya Komunikasi dengan Ketua PartaiPolitik Secara Personal dalam rangka Bridging Aspirasi Badan Kesbangpol dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Balangan dalam rangka Peningkatan Peran Parpol dalam Peningkatan Pendidikan Politik	FasilitasKoordinasi dan Komunikasi dengan Pimpinan Parpol dan Pimpinan DPRD Kab. Balangan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang Aktif	100 %	435.943.000	0 %	177.656.600	Melaksanakan Sosialisasi Mengenai Pentingnya Pendaftaran Ormas dan Menjalankan /Melaksanakan Kegiatan Penjemputan Berkas terkait Ormas	Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran ormas	Melaksanakan Monitoring dan pengawasan ormas
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Angka Potensi Konflik Sosial Berlatar Belakang Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama yang Tertangani	1 Laporan	1.100.969.000	0 Laporan	28.549.600	Koordinasi yang baik dengan lintas Sektor yang ada seperti Forum Kerukunan Umat Beragama, Badan Narkotika Nasional terutama dalam mencegah munculnya potensi konflik terkait Agama dan masalah sosial terutama di daerah rawan konflik	1. Terbatasnya kegiatan fasilitasi kerukunan umat beragama serta penanganan masalah penyalahgunaan narkoba.	Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor yang ada untuk mencegah munculnya potensi konflik
	PROGRAM PENINGKATAN KEMASPAKAPAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Potensi Konflik yang Terealisasi	100 %	3.332.757.300	100%	478.686.404	Koordinasi yang baik dengan Instansi Vertikal serta Lintas Sektor terkait lainnya terutama dalam mencegah munculnya potensi konflik Sosial terutama di daerah rawan konflik	1. Fasilitas terkait Kewaspadaan dini dan mitigasi kerawanan konflik sosial yang masih kurang. 2. Pemahaman masyarakat terkait deteksi dini yang masih kurang.	Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor yang ada untuk mencegah munculnya potensi konflik
22	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	74 BB	40.150.797.509	0 BB	41.616.522.438	- Kerjasama yang baik antara bidang dengan sub bagian perencanaan sehingga data-data yang diperlukan bis segera dipenuhi;	- Masih lemahnya pemahaman sebagian ASN tentang keselarasan antara target dan kinerja yang dilakukan;	- Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan bidang-bidang teknis
		Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	84		0		- Adanya prosedur / SOP yang jelas	- Lemahnya pelaksanaan pelayanan di tingkat lapangan	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Rasio penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan yang terpenuhi	1 %	2.557.362.008	0.8 %	234.679.361	Terdapat banyaknya usulan kebutuhan infrastruktur pendukung kemandirian pangan	Terlambatnya proses pengadaan dikarenakan perubahan proses tata cara pengadaan dan perubahan peraturan presiden terkait pengadaan barang dan jasa	Koordinasi proses pengadaan dan melakukan pengawasan terhadap perkembangan proses kegiatan penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan

	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH Konsumsi	89.16 %	6.161.307.040	27.89 %	1.858.186.333	Faktor yang mendorong tercapainya skor PPH (Pola Pangan Harapan) konsumsi yang tinggi meliputi ketersediaan dan aksesibilitas pangan yang beragam, bergizi, dan berimbang sesuai kebutuhan gizi masyarakat. Keberhasilan ini juga dipengaruhi oleh peningkatan produksi pangan lokal, edukasi gizi yang efektif, distribusi pangan yang merata, serta peran aktif rumah tangga dalam memilih dan mengonsumsi pangan non-beras seperti sayur, buah, umbi, sumber protein hewani dan nabati.	Faktor penghambat tercapainya skor PPH konsumsi yang optimal antara lain keterbatasan akses terhadap pangan beragam akibat rendahnya daya beli masyarakat, minimnya edukasi gizi, serta ketegantungan tinggi pada satu jenis pangan pokok seperti beras. Selain itu, distribusi pangan yang belum merata, rendahnya produksi dan konsumsi pangan sumber protein serta sayur dan buah, serta kebiasaan konsumsi yang tidak seimbang turut memperburuk skor PPH. Faktor budaya, geografis, serta kurangnya dukungan program intervensi pangan dan gizi di daerah tertinggal juga menjadi tantangan signifikan dalam mencapai pola konsumsi pangan yang ideal.	Memperkuat advokasi edukasi dan sosialisasi Diversifikasi pangan untuk mencapai pola konsumsi pangan bergizi seimbang dan aman (B2SA), Melaksanakan pertemuan, sosialisasi dan pelatihan pengembangan pangan lokal
		Skor PPH Ketersediaan	88.24 %		24.88 %		Faktor yang mendorong tercapainya skor PPH ketersediaan yang tinggi meliputi peningkatan produksi pangan yang beragam melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, penguatan cadangan pangan, serta pengembangan sistem distribusi dan logistik yang efisien. Diversifikasi komoditas pangan, dukungan teknologi pertanian	Faktor penghambat tercapainya skor PPH ketersediaan yang optimal antara lain ketegantungan tinggi pada komoditas pangan tertentu seperti beras, rendahnya diversifikasi produksi pangan, serta keterbatasan infrastruktur pertanian dan distribusi. Tantangan lainnya mencakup degradasi lahan, perubahan iklim, minimnya adopsi teknologi pertanian, serta lemahnya perencanaan dan koordinasi antar sektor dalam penyediaan pangan yang beragam	Perkuat koordinasi untuk peningkatan ketersediaan dan akses fisik terhadap pangan ke setiap rumah tangga dan individu dalam keluarga
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan desa rentan pangan	20%	677.674.500	1.1 %	35.003.569	Masih terdapat daerah yang terdiksi daerah rentan dan rawan pangan di Kabupaten Balangan	Belum dilakukannya proses intervensi dan pengambilan data terkait daerah rentan rawan pangan tahun 2025	Melakukan kegiatan intervensi pada daerah rentan rawan pangan dan dilakukan pendataan kembali terkait daerah rentan rawan pangan sesuai indikator untuk tahun 2025
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	90%	86.097.200	17.6 %	56.975.156	Tersedianya peralatan pengujian sederhana untuk pengujian pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	Tindak lanjut untuk terjadinya temuan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang tidak memenuhi persyaratan belum dapat dilakukan	Melakukan koordinasi dan menetapkan tahapan cara tindak lanjut untuk terjadinya temuan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang tidak memenuhi persyaratan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)	5%	1.160.061.000	1.4	15.064.000	Memiliki kerangka survey yang bersisnkan RTP sehingga dapat didata per-bulan atau per-triwulan Restocking benih ikan yang dilakukan di 2024	Hasil tangkapan ikan tidak menentu Hasil tangkapan lebih banyak untuk konsumsi pribadi Produksi perikanan tangkap di perairan darat tidak sebanyak produksi perikanan di laut sehingga untuk mendapatkan 3 kg - 6 kg itu sulit	Melakukan pendataan per bulan sesuai dengan kerangka survey yang telah ada Menunggu kelanjutan dari pengaplikasian cara pendataan statistik perikanan terbaru, berbasis pada Portal Data KKP yang saat ini masih pada tahap pemenuhan data RTP agar berkesesuaian dengan data KUSUKA
		Persentase peningkatan produktivitas perikanan tangkap (%)	5%		1.4		Memiliki perairan umum darat seperti sungai dan rawa Telah diberikan bantuan sarana usaha penangkapan ikan berupa alat tangkap dan perahu tanpa motor	Hasil tangkapan ikan tidak menentu Hasil tangkapan lebih banyak untuk konsumsi pribadi Produksi perikanan tangkap di perairan darat tidak sebanyak produksi perikanan di laut sehingga untuk mendapatkan 3 kg - 6 kg itu sulit	Melakukan pendataan per bulan sesuai dengan kerangka survey yang telah ada Menunggu kelanjutan dari pengaplikasian cara pendataan statistik perikanan terbaru, berbasis pada Portal Data KKP yang saat ini masih pada tahap pemenuhan data RTP agar berkesesuaian dengan data KUSUKA
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (%)	50.8 %	45.649.231.100	36.3 %	842.655.583	Memiliki data RTP untuk didata per bulan atau per triwulannya berdasarkan kerangka survey yang ada Memiliki banyak pokdakan Telah diberikan bantuan sarana usaha pembudidayaan ikan berupa kolam, karamba, bioflok, pakan dan bibit Dilakukan koordinasi maupun pemantauan ke lapangan terkait kesehatan ikan dan lingkungan budidaya	Movev dan pembinaan masih kurang, sehingga banyak pokdakan yang setelah diberikan bantuan tidak melakukan kegiatan budidaya kembali Penumbuhan pokdakan yang tidak terbatas dan masih lemahnya administrasi kelompok akibat masih kurangnya pembinaan	Melakukan pendataan per bulan sesuai dengan kerangka survey yang telah ada Menunggu kelanjutan dari pengaplikasian cara pendataan statistik perikanan terbaru, berbasis pada Portal Data KKP yang saat ini masih pada tahap pemenuhan data RTP agar berkesesuaian dengan data KUSUKA Meningkatkan movev dan pengawasan pada bantuan yang telah diberikan Melaksanakan bimtek dan movev budidaya ikan
		Persentase Peningkatan Produktivitas Perikanan Budidaya (%)	3.75 %		2.5 %		Memiliki data luas areal budidaya Telah diberikan bantuan sarana usaha pembudidayaan ikan berupa kolam, karamba, bioflok, pakan dan bibit Dilakukan koordinasi maupun pemantauan ke lapangan terkait kesehatan ikan dan lingkungan budidaya	Perhitungan produktivitas perikanan budidaya berbeda dengan produktivitas pertanian, di mana satuan antara kolam, karamba dan kolam bioflok berbeda, sehingga perlu konversi ke satuan yang sama Banyak sarana budidaya yang sudah tidak berproduksi lagi tetapi masih diasumsikan tetap berproduksi dikarenakan kurangnya movev dan pengawasan ke lapangan sehingga dianggap tetap mampu meningkatkan produksi perikanan	Meningkatkan movev ke lapangan terkait sarana usaha perikanan yang masih beroperasi atau tidak
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Peningkatan Kawasan Perikanan Lestari (%)	20%	519.020.800	4		Perairan umum daratan di Kabupaten Balangan terdiri dari sungai dan rawa Memiliki beberapa pokmaswas Pemberian bantuan sarana pengawasan perikanan seperti alat pengawasan dan papan larangan destructive fishing Sosialisasi destructive fishing	Data akurat mengenai luas perairan umum di Kabupatm Balangan masih belum tersedia, selama ini data berdasarkan akurasi google maps Pengawasan perikanan bukan hanya kawasan lestari, tetapi keseluruhan perairan umum darat, hal ini dikarenakan semua SDI yang ada harus dilestarikan bukan hanya wilayah tertentu saja, sehingga narasi perikanan lestari tidak diperlukan	Meningkatkan pembinaan dan movev terhadap pokmaswas yang sudah terbentuk Pengawasan pada bidang perikanan bukan hanya masalah kegiatan destructive fishing tetapi juga pengawasan pada usaha perikanan yang lain, salah satunya adalah pengawasan izin berusaha sehingga nantinya dilakukan sosialisasi kepatuhan izin berusaha pada usaha perikanan
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Rasio peningkatan diversifikasi produk olahan hasil perikanan	86%	1.542.830.600	0	47.927.000	Ketersediaan data poklahsar beserta produk yang dihasilkan Akan dibangun rumah produksi telah diberikan bantuan sarana usaha pengolahan hasil perikanan	Belum dilakukannya kegiatan pelatihan olahan hasil perikanan pada tahun ini	Pelatihan diversifikasi olahan hasil perikanan
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan	1.1 %	38.114.423.200	1.15 %	1.020.289.885	Masih tingginya minat masyarakat untuk melakukan usaha pertanian / perkebunan	Adanya serangan penyakit pada tanaman perkebunan (GDK, JAP, KAS)	Pengendalian pada tanaman yang terserang penyakit tersebut
		Persentase Peningkatan Populasi Ternak	10%		0		Pengadaan ternak untuk meningkatkan populasi ternak	Proses kelengkapan CPCL dan Pemberikan proposal seluruh kelompok yang mendapatkan pengadaan, proses pengadaan pada E-katalog yang masih berproses	melakukan monitoring terkait perkembangan ternak yang telah diberikan kepada kelompok penerima hibah
		Persentase Pelayanan Inseminasi Buatan	6%		1.2 %		Melakukan perkawinan hewan ternak sesuai dengan permintaan para peternak jika ternak mengalami birahi	Pengadaan straw baru saja direalisasikan dan N2 cair mendapatkan bantuan dari pihak provinsi, sehingga para petugas kesehatan hewan melakukan kegiatan inseminasi buatan sesuai permintaan para peternak	Mengadakan sosialisasi mengenai pengetahuan peternak terkait inseminasi buatan
		Persentase Peningkatan Produktifitas Tanaman Pangan	1.10%		1.37 %		Pengadaan Benih padi unggul dan saprodi lainnya	- Ketersedian benih padi yang masih kurang di wilayah Kabupaten Balangan - Proses pengadaan E-Katalog yang terbaru memerlukan berkas/data referensi harga online dan offline - CPCL penerima bantuan yang belum sesuai dengan bantuan volume pengadaan	- Mencari informasi ketersediaan Benih Padi di luar wilayah Kabupaten Balangan - Melakukan survei harga lebih cepat sebagai bahan referensi harga - Mempercepat proses penyusunan CPCL penerima bantuan sesuai dengan volume pengadaan
		Persentase Peningkatan Produktifitas Hortikultura	1.10%		2.48 %		- Tingginya minat petani untuk pengembangan Budidaya Tanaman Hortikultura melalui proposal permohonan bantuan yang diajukan - Program pemerintah pusat untuk menjaga stabilitas harga pangan pokok khususnya komoditas Cabai yang merupakan salah satu penyumbang Inflasi Daerah	Serangan hama penyakit serta kondisi cuaca sehingga mempengaruhi provitas hasil panen	Adanya perhatian serta pendampingan dari petugas dilapangan baik dari PPL maupun petugas POPT serta dukungan daerah yang membantu Budidaya Pertanian
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	8%	104.142.233.310	2.61	2.612.946.785	Melakukan pendataan populasi ternak secara rutin sehingga dapat mengkonversikan ketersediaan daging ternak di Kab. Balangan	Pendataan hewan ternak yang terlambat di kumpulan petugas membuat hasil perhitungan produksi peternakan mengalami keterlambatan	Perlu nya pemantauan lebih baik terkait ketepatan petugas mengumpulkan data dan melakukan kegiatan sosialisasi kepada peternak terkait pentingnya kesehatan hewan ternak sehingga meningkat populasi ternak di Kab Balangan
		Persentase peningkatan prasarana pertanian	20%		0		Penganggaran aprisal dalam kegiatan pembebasan tanah (LP2B)	- penunjukan pengadaan yang lambat - peralihan system e-katalog versi 5.0 ke versi 6,0	
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100%	1.226.517.850	30%	194.187.501	Melakukan kegiatan sosialisasi setiap minggunya ke para kelompok peternak yang akan mendapatkan bantuan di tahun 2025	Ketersediaan para kelompok ternak untuk mengikuti sosialisasi agar terjadi kecocokan waktu	Perlu nya meningkatkan kesadaran peternak pentingnya mengikuti sosialisasi agar meningkat ilmu pengetahuannya terkait pemeliharaan hewan ternak
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas wilayah yang terdampak bencana Perkebunan yang dapat ditanggulangi dan di kendalikan	100%	15.623.979.300	0	148.854.200	1. Telah dibuat rekap data petani terdampak bencana banjir 2. Telah dibuat perencanaan pengadaan mangkok sadap	Penyesuaian pada belanja pada e-katalog V6	Pengadaan mangkok sadap pada Triwulan III
		Persentase Luasan Pengendalian terhadap bencana alam, DPI dan serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura	100%		100%		Adanya Stok Opname Obat-Obatan untuk hama dan penyakit	Serangan Hama dan Penyakit terlambat diketahui	Melakukan pemeriksaan secara rutin pada tanaman
							1. Telah dibuat CPCL petani penerima 2. Telah dibuat data persiapan pengadaan	Penyesuaian pada belanja pada e-katalog V6	1. Pengadaan pupuk dan fungisida pada Triwulan III 2. Penyesuaian harga barang pada DPA perubahan
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	4.2 %	4.431.395.900	0.42 %	1.033.423.000	Terfasilitasinya pertemuan penyuluh untuk menyampaikan teknologi tepat guna	Kurangnya informasi tanpa inisiatir penyuluh yang diwadahi dengan pertemuan sosialisasi	

23	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	76 Nilai	12.978.191.692	25 %	2.521.738.909		Belum optimalnya kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana kerja untuk mendukung optimalnya pelaksanaan kerja dan pelayanan	Pemberhatian tempat kerja melalui rehab fasilitas kantor untuk lebih meningkatkan kenyamanan kerja dan pelayanan kepada Masyarakat
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Rasio Kebutuhan Tenaga Kerja terhadap Persediaan Tenaga Kerja	25 %	290.896.000	11 %	11.328.000	1. Potensi Sumber Daya Lokal (Kabupaten Balangan memiliki sumber daya alam, seperti pertambangan dan perkebunan, yang mendorong kebutuhan tenaga kerja terampil untuk mendukung sektor-sektor tersebut); 2. Dukungan Pemerintah Daerah/ Kebijakan pemerintah daerah, seperti program pelatihan kerja melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mendorong pengembangan keterampilan tenaga kerja lokal); 3. Kebutuhan Ekonomi(Pertumbuhan ekonomi di Balangan, terutama di sektor pertambangan dan agribisnis, menciptakan permintaan akan tenaga kerja yang terlatih); 4. Kerjasama dengan Swasta(Adanya kolaborasi dengan perusahaan swasta, seperti perusahaan tambang, untuk menyediakan pelatihan dan penyerapan tenaga kerja lokal); 5.Partisipasi Pemuda(Minat pemuda Balangan untuk meningkatkan keterampilan melalui pelatihan kerja atau pendidikan vokasi menjadi pendorong utama	Kesenjangan Keterampilan: Banyak tenaga kerja lokal yang belum memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri, terutama di sektor teknologi dan pertambangan modern. Akses Informasi Terbatas: Informasi tentang peluang kerja atau program pelatihan sering kali tidak merata, terutama di wilayah pedesaan atau terpencil di Balangan. Anggaran Terbatas: Keterbatasan anggaran daerah untuk mendanai program pelatihan atau pengembangan tenaga kerja menghambat implementasi yang optimal. Minimnya Keterlibatan Masyarakat: Kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan program, seperti musyawarah pembangunan, menyebabkan program kurang sesuai dengan kebutuhan lokal.	1. Peningkatan Fasilitas Pelatihan: Meningkatkan kualitas dan kuantitas bala latihan kerja dengan dukungan teknologi terkini untuk menyesuaikan dengan kebutuhan industri. 2. Sinkronisasi Kurikulum: Mengembangkan kurikulum pelatihan yang selaras dengan kebutuhan pasar kerja lokal, seperti keterampilan di sektor pertambangan, perkebunan, atau pariwisata. 3. Peningkatan Akses Informasi: Membuat platform digital atau pusat informasi ketenagakerjaan untuk menyebarkan informasi pelatihan dan lowongan kerja ke seluruh wilayah Balangan. 4. Kerjasama Lintas Sektor: Memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, perusahaan swasta, dan institusi pendidikan untuk menciptakan program pelatihan yang terintegrasi. 5. Pemberdayaan Masyarakat: Melibatkan masyarakat, terutama kelompok miskin dan pemuda, dalam perencanaan program melalui musyawarah atau forum koordinasi untuk memastikan program relevan dengan kebutuhan lokal. 6. Pemantauan dan Evaluasi: Melakukan evaluasi berkala terhadap program perencanaan tenaga kerja untuk memastikan efektivitas dan dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja lokal
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Terampil sesuai Kebutuhan Dunia Kerja	90%	32.102.837.374	30%	8.719.043.400	Peraturan Perundang-undangan,Kesadaran dan Kemauan Para Pihak,Dukungan Pemerintah dan Pihak Ketiga,Faktor Ekonomi,Kualitas Sumber Daya Manusia	Sub kegiatan vokasi tidak bisa dilaksanakan dikarenakan ada beberapa kode rekening yang terkena dampak pengurangan hampir 50% , diantaranya adalah belanja bahan untuk pelatihan, jika bahan dipotong sebesar 50% maka hampir dipastikan tidak bisa dilaksanakan dikarenakan akan mempengaruhi pencapaian Kompetensi yang berpedoman pada SKKNI	untuk kegiatan vokasi yang terkena imbas pemotongan anggaran dilaksanakan perencanaan ulang terkait jumlah paket yang akan dilaksanakan, dan direncanakan akan dilaksanakan diperubahan
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Kebutuhan Kerja yang Terpenuhi	60%	1.925.691.200	10%	146.715.700	1. Potensi Ekonomi Lokal: Sektor pertambangan (batubara) dan perkebunan (kelapa sawit) di Kabupaten Balangan menciptakan peluang kerja yang mendorong penempatan tenaga kerja lokal untuk memenuhi kebutuhan industri. 2. Kebijakan Pemerintah Daerah: Program pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Balangan, seperti pelatihan kerja dan kerja sama dengan perusahaan, mendukung penempatan tenaga kerja. 3. Kerjasama dengan Perusahaan Swasta: Perusahaan tambang dan perkebunan di Balangan sering kali memiliki komitmen untuk mempekerjakan tenaga kerja lokal, mendorong program penempatan yang terstruktur. 4. Tingginya Angkatan Kerja: Jumlah angkatan kerja yang besar di Balangan menjadi pendorong untuk mengoptimalkan penempatan tenaga kerja guna mengurangi pengangguran. 5.Program Pelatihan dan Sertifikasi: Adanya program pelatihan keterampilan oleh pemerintah dan swasta mendorong tenaga kerja lokal untuk memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh pasar kerja.	1. Keterbatasan Keterampilan Tenaga Kerja: Banyak tenaga kerja lokal yang belum memiliki keterampilan teknis atau sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan industri, seperti operasi alat berat atau manajemen perkebunan. 2. Kesenjangan Informasi: Informasi tentang lowongan kerja atau program pelatihan sering kali tidak sampai ke masyarakat di wilayah terpencil, seperti desa-desa di Kecamatan Paritang atau Lamphong. 3. Ketimpangan Penyerapan Tenaga Kerja: Banyak perusahaan lebih memilih tenaga kerja dari luar daerah yang dianggap lebih terampil, mengurangi peluang tenaga kerja lokal. 4. Tingginya Angkatan Kerja: Jumlah angkatan kerja yang besar di Balangan menjadi pendorong untuk mengoptimalkan penempatan tenaga kerja guna mengurangi pengangguran. 5. Program Pelatihan dan Sertifikasi: Adanya program pelatihan keterampilan oleh pemerintah dan swasta mendorong tenaga kerja lokal untuk memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh pasar kerja.	1. Peningkatan Kapasitas BLK: Mengembangkan Balai Latihan Kerja dengan peralatan modern dan tenaga pengajar yang kompeten untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal sesuai kebutuhan industri. 2. Sinkronisasi dengan Kebutuhan Industri: Menyesuaikan kurikulum pelatihan dengan kebutuhan spesifik sektor pertambangan dan perkebunan, seperti pelatihan alat berat, teknik pertanian, atau administrasi. Peningkatan Akses Informasi: Membuat pusat informasi ketenagakerjaan berbasis digital atau melalui kader desa untuk menyebarkan informasi lowongan kerja dan pelatihan ke seluruh wilayah Balangan. 3. Kerjasama dengan Perusahaan: Memperkuat perjanjian dengan perusahaan tambang dan perkebunan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal melalui kuota wajib atau program magang. 4. Pemberdayaan Masyarakat: Melibatkan masyarakat, terutama kelompok rentan dan pemuda, dalam perencanaan program penempatan tenaga kerja melalui musyawarah desa atau forum ketenagakerjaan. 5. Pemantauan dan Evaluasi: Melakukan evaluasi berkala terhadap program penempatan tenaga kerja untuk mengukur efektivitas, mengidentifikasi kendala, dan menyesuaikan strategi dengan dinamika pasar kerja lokal.
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase tenaga kerja yang terlindungi hak-haknya	90%	15.373.195.900	30%	3.015.891.200	Peraturan Perundang-undangan,Kesadaran dan Kemauan Para Pihak,Dukungan Pemerintah dan Pihak Ketiga,Faktor Ekonomi,Kualitas Sumber Daya Manusia	Kurangnya Pemahaman,Perbedaan Kepentingan,Ketidakpercayaan,Fasilitas yang Tidak Memadai,Faktor Eksternal,Kelemahan Serikat Pekerja,Proses Penyelesaian Sengketa	Peningkatan komunikasi dan kerjasama: Menciptakan forum komunikasi yang efektif antara pekerja dan pengusaha,Pendidikan dan pelatihan Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan industrial kepada semua pihak,Penyusunan perjanjian kerja bersama (PKB): PKB yang jelas dan adil dapat menjadi dasar hubungan industrial yang kuat.
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	65%	585.492.300	95.76%	49.215.000	Adanya penambahan koperasi aktif, pasca pembentukan koperasi desa/keurahan merah putih, Adanya hibsaan dan surat pengingat dari dinas yang mendorong koperasi untuk melaksanakan kewajiban Rapat Anggota Tahunan (RAT), Tersedianya SDM pengawas koperasi	Masih banyak koperasi yang tidak melaksanakan RAT secara rutin, Belum tersedia tenaga pendamping koperasi secara khusus, Sebagian koperasi tidak memiliki kegiatan usaha yang nyata atau hanya dibentuk untuk kepentingan tertentu, sehingga tidak beroperasi sebagaimana mestinya	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi dengan SDM yang kompeten	50%	513.808.000	7%	4.190.000	Adanya kebutuhan peningkatan kapasitas pengurus dan anggota koperasi, Adanya peran aktif Dinas Koperasi sebagai fasilitator Pelatihan Koperasi, Dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan kegiatan pelatihan koperasi	Keterbatasan anggaran untuk penyelenggaraan pelatihan, Rendahnya minat atau kesadaran koperasi mengikuti pelatihan, Terbatasnya regenerasi pengurus, yang menyebabkan koperasi dikelola oleh orang yang sama secara berulang tanpa adanya pembaruan pengetahuan dan semangat.	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha mikro yang memenuhi kualifikasi standar kompetensi usaha	4%	2.368.974.200	0.47%	31.679.975	Tersedianya anggaran untuk memfasilitasi pelaku usaha mikro dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi sehingga pelaku usaha mikro tertarik dan antusias untuk mengikuti program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, Tersedianya anggaran untuk memfasilitasi pelaku usaha mikro dalam Pemberdayaan Usaha Mikro yang Diakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan sehingga dapat memberikan semangat dan motivasi bagi pelaku usaha mikro dalam meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha melalui program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah	Pelaksanaan sesuai dengan anggaran kas yang telah disusun sehingga masih ada kegiatan yang belum terlaksana karena direncanakan di triwulan III dan IV	Melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro Melalui Pendataan, Kemitraan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan bagi pelaku usaha mikro sesuai dengan anggaran kas yang telah disusun di triwulan III dan IV
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang skala usahanya bertambah	1.21%	603.800.000	0.12%	30.069.500	Tersedianya anggaran untuk memfasilitasi pelaku usaha mikro dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi sehingga pelaku usaha mikro tertarik dan antusias untuk mengikuti program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah	Pelaksanaan sesuai dengan anggaran kas yang telah disusun sehingga masih ada kegiatan yang belum terlaksana karena direncanakan di triwulan III dan IV	Melaksanakan kegiatan fasilitasi sarana dan prasarana penunjang usaha bagi pelaku usaha mikro sesuai dengan anggaran kas yang telah disusun di triwulan III
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase warga transmigrasi yang terampil	16%	736.145.000	0 %	50.690.000	Faktor pendorongnya adalah, meningkatnya kesadaran warga transmigrasi untuk terus mendukung program yang dilaksanakan, dukungan anggaran yang cukup dan adanya dukungan dengan SKPD lain untuk membangun dikasi satuan pemukiman transmigrasi	Masih belum bisanya mengendalikan kelebihan air yang secara tetap menggenangi lahan sepanjang tahun yang tentunya masih menghambat kegiatan bercocok tanam	Mencoba mencari pejaikan dengan bekerja sama dengan pihak akademisi yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan tanah rawa agar masyarakat bisa melaksanakan budidaya tanaman terutama padi dengan dorongan teknologi dari mereka
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase lahan usaha yang dikelola oleh warga transmigrasi	19.5%	456.030.000	0 %	26.150.000	Faktor pendorongnya adalah, meningkatnya kesadaran warga transmigrasi untuk terus mendukung program yang dilaksanakan, dukungan anggaran yang cukup dan adanya dukungan dengan SKPD lain untuk membangun dikasi satuan pemukiman transmigrasi	Masih belum bisanya mengendalikan kelebihan air yang secara tetap menggenangi lahan sepanjang tahun yang tentunya masih menghambat kegiatan bercocok tanam	Mencoba mencari pejaikan dengan bekerja sama dengan pihak akademisi yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan tanah rawa agar masyarakat bisa melaksanakan budidaya tanaman terutama padi dengan dorongan teknologi dari mereka
24	Kecamatan Lamphong								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74 Nilai	5.838.047.534	74 Nilai	2.702.671.741	Adanya Dukungan kepala SKPD dalam memantau anggaran belanja dan Pemahaman dari PPK tentang penyusunan anggaran	Adanya mekanisme penggunaan aplikasi si Open dan ketidaksiplinan PPTK terhadap angka yang sudah disusun	PPK SKPD akan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan anggaran sesuai dengan anggaran kas sehingga dapat memberikan kinerja yang lebih cepat

	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP	1 Laporan	197.013.500	0 Laporan	30.045.500	Adanya Dukungan kepala SKPD dalam memantau anggaran belanja dan Pemahaman dari PPK tentang penyusunan anggaran	Adanya mekanisme penggunaan aplikasi si Open dan ketidaksiplinan PPTK terhadap angkas yang sudah disusun	PPK SKPD akan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan anggaran sesuai dengan anggaran kas sehingga dapat memberikan kinerja yang lebih cepat
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP	1 Laporan	235.964.500	0 Laporan	82.348.500	Adanya Dukungan kepala SKPD dalam memantau anggaran belanja dan Pemahaman dari PPK tentang penyusunan anggaran	Adanya mekanime penggunaan aplikasi si Open dan ketidaksiplinan PPTK terhadap angkas yang sudah disusun	PPK SKPD akan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan anggaran sesuai dengan anggaran kas sehingga dapat memberikan kinerja yang lebih cepat
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP	1 Laporan	64.464.800	0 Laporan	10.620.000	Adanya Dukungan kepala SKPD dalam memantau anggaran belanja dan Pemahaman dari PPK tentang penyusunan anggaran	Adanya mekanisme penggunaan aplikasi si Open dan ketidaksiplinan PPTK terhadap angkas yang sudah disusun	PPK SKPD akan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan anggaran sesuai dengan anggaran kas sehingga dapat memberikan kinerja yang lebih cepat
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP	1 Laporan	215.926.200	0 Laporan	66.100.000	Adanya Dukungan kepala SKPD dalam memantau anggaran belanja dan Pemahaman dari PPK tentang penyusunan anggaran	Adanya mekanisme penggunaan aplikasi si Open dan ketidaksiplinan PPTK terhadap angkas yang sudah disusun	PPK SKPD akan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan anggaran sesuai dengan anggaran kas sehingga dapat memberikan kinerja yang lebih cepat
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP	1 Laporan	189.084.200	0 Laporan	63.488.300	Adanya Dukungan kepala SKPD dalam memantau anggaran belanja dan Pemahaman dari PPK tentang penyusunan anggaran	Adanya mekanisme penggunaan aplikasi si Open dan ketidaksiplinan PPTK terhadap angkas yang sudah disusun	PPK SKPD akan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan anggaran sesuai dengan anggaran kas sehingga dapat memberikan kinerja yang lebih cepat
25	Kecamatan Awaysan								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70,4 Nilai	4.794.281.572	71,40*	2.481.440.772	Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dan Penambahan SDM yang berkompeten	Peralihan system e-katalog versi 5,0 ke versi 6,0 yang mengakibatkan keterlambatan dalam merealisasikan belanja	Melakukan percepatan realisasi anggaran sesuai dengan anggaran kas yang telah disusun
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1 Laporan	103.995.200	0 Laporan	43.635.200	Tersedianya anggaran sesuai kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan	Peralihan system e-katalog versi 5,0 ke versi 6,0 yang mengakibatkan keterlambatan dalam merealisasikan belanja	Melakukan percepatan realisasi anggaran sesuai dengan anggaran kas yang telah disusun
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1 Laporan	138.921.000	0 Laporan	95.871.100	Tersedianya anggaran sesuai kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan	Peralihan system e-katalog versi 5,0 ke versi 6,0 yang mengakibatkan keterlambatan dalam merealisasikan belanja	Melakukan percepatan realisasi anggaran sesuai dengan anggaran kas yang telah disusun
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	103.280.000	0 Laporan	48.590.000	Tersedianya anggaran sesuai kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan	Peralihan system e-katalog versi 5,0 ke versi 6,0 yang mengakibatkan keterlambatan dalam merealisasikan belanja	Melakukan percepatan realisasi anggaran sesuai dengan anggaran kas yang telah disusun
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1 Laporan	403.534.900	0 Laporan	131.024.000	Tersedianya anggaran sesuai kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan	Peralihan system e-katalog versi 5,0 ke versi 6,0 yang mengakibatkan keterlambatan dalam merealisasikan belanja	Melakukan percepatan realisasi anggaran sesuai dengan anggaran kas yang telah disusun
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Laporan	182.533.400	0 Laporan	109.197.360	Tersedianya anggaran sesuai kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan	Peralihan system e-katalog versi 5,0 ke versi 6,0 yang mengakibatkan keterlambatan dalam merealisasikan belanja	Melakukan percepatan realisasi anggaran sesuai dengan anggaran kas yang telah disusun
26	Kecamatan Paringin								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73 nilai	9.641.777.784	72,75*	4.338.815.388	Tersedianya Anggaran sesuai kebutuhan	Adanya efisiensi anggaran terhadap kegiatan-kegiatan pendukung layanan SKPD	Menyusun alokasi anggaran kegiatan-kegiatan pendukung layanan SKPD yang tersedia ke dalam kegiatan yang lebih di prioritaskan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1 Laporan	412.717.040	0	187.627.700	Tersedianya Anggaran sesuai kebutuhan	Adanya efisiensi anggaran terhadap kegiatan-kegiatan pendukung layanan SKPD	Menyusun alokasi anggaran kegiatan-kegiatan pendukung layanan SKPD yang tersedia ke dalam kegiatan yang lebih di prioritaskan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1 Laporan	2.792.602.300	0	715.928.555	Tersedianya Anggaran sesuai kebutuhan	Adanya efisiensi anggaran terhadap kegiatan-kegiatan pendukung layanan SKPD	Menyusun alokasi anggaran kegiatan-kegiatan pendukung layanan SKPD yang tersedia ke dalam kegiatan yang lebih di prioritaskan
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	251.912.800	0	139.322.900	Tersedianya Anggaran sesuai kebutuhan	Adanya efisiensi anggaran terhadap kegiatan-kegiatan pendukung layanan SKPD	Menyusun alokasi anggaran kegiatan-kegiatan pendukung layanan SKPD yang tersedia ke dalam kegiatan yang lebih di prioritaskan
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Laporan	359.558.600	0	80.712.100	Tersedianya Anggaran sesuai kebutuhan	Adanya efisiensi anggaran terhadap kegiatan-kegiatan pendukung layanan SKPD	Menyusun alokasi anggaran kegiatan-kegiatan pendukung layanan SKPD yang tersedia ke dalam kegiatan yang lebih di prioritaskan
27	Kecamatan Batumandi								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71 Nilai	6.059.887.540	75,90*	3.058.666.844	Monitoring dan Evaluasi dari PA dan PPK Terhadap PPTK Agar Melaksanakan Kegiatan Sesuai Dengan Anggaran Kas yang sudah ditetapkan	Adanya efisiensi anggaran terhadap kegiatan-kegiatan pendukung layanan SKPD	Menyusun kembali anggaran kas agar realisasi selanjutnya lebih optimal
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1 Laporan	41.792.500	0 Laporan	18.575.800	Monitoring dan Evaluasi dari PA dan PPK Terhadap PPTK Agar Melaksanakan Kegiatan Sesuai Dengan Anggaran Kas yang sudah ditetapkan	Adanya perubahan anggaran yang akan disesuaikan pada Anggaran Perubahan	Menyusun kembali anggaran kas agar realisasi selanjutnya lebih optimal
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1 Laporan	166.966.500	0 Laporan	113.720.000	Monitoring dan Evaluasi dari PA dan PPK Terhadap PPTK Agar Melaksanakan Kegiatan Sesuai Dengan Anggaran Kas yang sudah ditetapkan	Adanya perubahan anggaran yang akan disesuaikan pada Anggaran Perubahan	Menyusun kembali anggaran kas agar realisasi selanjutnya lebih optimal
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	9.800.000	0 Laporan	7.550.000	Monitoring dan Evaluasi dari PA dan PPK Terhadap PPTK Agar Melaksanakan Kegiatan Sesuai Dengan Anggaran Kas yang sudah ditetapkan	Adanya perubahan anggaran yang akan disesuaikan pada Anggaran Perubahan	Menyusun kembali anggaran kas agar realisasi selanjutnya lebih optimal
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1 Laporan	377.196.800	0 Laporan	57.360.600	Monitoring dan Evaluasi dari PA dan PPK Terhadap PPTK Agar Melaksanakan Kegiatan Sesuai Dengan Anggaran Kas yang sudah ditetapkan	Adanya perubahan anggaran yang akan disesuaikan pada Anggaran Perubahan	Menyusun kembali anggaran kas agar realisasi selanjutnya lebih optimal
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Laporan	126.195.900	0 Laporan	80.205.000	Monitoring dan Evaluasi dari PA dan PPK Terhadap PPTK Agar Melaksanakan Kegiatan Sesuai Dengan Anggaran Kas yang sudah ditetapkan	Adanya perubahan anggaran yang akan disesuaikan pada Anggaran Perubahan	Menyusun kembali anggaran kas agar realisasi selanjutnya lebih optimal
28	Kecamatan Tebing Tinggi								

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72,4 Nilai	4.962.812.239	72,45*	2.202.966.585	PPK maupun PA selalu memberikan soprt dan monitoring anggaran kas agar dapat berjalan sesuai dengan yang telah di tetapkan	Masih ada beberapa PPTK yang gaptek terhadap pengadaan barang dan jasa, sehingga perlu di dampingi dan di arahkan agar tidak terjadi kesalahan dalam peng sj an. dan agar dapat memperhatikan anggaran kasnya	perlu mendampingi PPTK yang masih belum mahir dalam pelaksanaan peng sj an
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Disusun Tepat Waktu dan sesuai SOP	1 Laporan	240.845.500	0	49.860.000	PPK maupun PA selalu memberikan soprt dan monitoring anggaran kas agar dapat berjalan sesuai dengan yang telah di tetapkan	Masih ada beberapa PPTK yang gaptek terhadap pengadaan barang dan jasa, sehingga perlu di dampingi dan di arahkan agar tidak terjadi kesalahan dalam peng sj an. dan agar dapat memperhatikan anggaran kasnya	perlu mendampingi PPTK yang masih belum mahir dalam pelaksanaan peng sj an
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KelurahanJumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang Disusun Tepat Waktu dan	1 Laporan	538.908.800	0	137.515.530	PPK maupun PA selalu memberikan soprt dan monitoring anggaran kas agar dapat berjalan sesuai dengan yang telah di tetapkan	Masih ada beberapa PPTK yang gaptek terhadap pengadaan barang dan jasa, sehingga perlu di dampingi dan di arahkan agar tidak terjadi kesalahan dalam peng sj an. dan agar dapat memperhatikan anggaran kasnya	perlu mendampingi PPTK yang masih belum mahir dalam pelaksanaan peng sj an
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Disusun Tepat Waktu dan sesuai SOP	1 Laporan	120.630.000	0	38.000.000	PPK maupun PA selalu memberikan soprt dan monitoring anggaran kas agar dapat berjalan sesuai dengan yang telah di tetapkan	Masih ada beberapa PPTK yang gaptek terhadap pengadaan barang dan jasa, sehingga perlu di dampingi dan di arahkan agar tidak terjadi kesalahan dalam peng sj an. dan agar dapat memperhatikan anggaran kasnya	perlu mendampingi PPTK yang masih belum mahir dalam pelaksanaan peng sj an
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP	1 Laporan	10.820.000	0	10.820.000	PPK maupun PA selalu memberikan soprt dan monitoring anggaran kas agar dapat berjalan sesuai dengan yang telah di tetapkan	-	-
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Disusun Tepat Waktu dan sesuai SOP	1 Laporan	293.351.900	0	158.713.600	PPK maupun PA selalu memberikan soprt dan monitoring anggaran kas agar dapat berjalan sesuai dengan yang telah di tetapkan	Masih ada beberapa PPTK yang gaptek terhadap pengadaan barang dan jasa, sehingga perlu di dampingi dan di arahkan agar tidak terjadi kesalahan dalam peng sj an. dan agar dapat memperhatikan anggaran kasnya	perlu mendampingi PPTK yang masih belum mahir dalam pelaksanaan peng sj an
29	Kecamatan Halong								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,40	5.284.436.814	75,90*	2.527.493.265	Dukungan Anggaran yang sudah mencukupi	Pengukuran SAKIP dilaksanakan untuk Tahun Sebelumnya, sehingga tidak menggambarkan keadaan Tahun Berjalan	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP	1 Laporan	544.420.100	0 Laporan	190.216.000	Dukungan Anggaran yang sudah mencukupi	Kinerja berupa Laporan Disampaikan pada Akhir Tahun Berjalan atau pada Awal Tahun Berikutnya	Mengubah Indikator Program berikut Targetnya, yang bisa Diukur setiap Triwulan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP	1 Laporan	200.433.800	0 Laporan	107.068.530	Dukungan Anggaran yang sudah mencukupi	Kinerja berupa Laporan Disampaikan pada Akhir Tahun Berjalan atau pada Awal Tahun Berikutnya	Mengubah Indikator Program berikut Targetnya, yang bisa Diukur setiap Triwulan
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP	1 Laporan	83.060.000	0 Laporan	26.830.000	Dukungan Anggaran yang sudah mencukupi	Kinerja berupa Laporan Disampaikan pada Akhir Tahun Berjalan atau pada Awal Tahun Berikutnya	Mengubah Indikator Program berikut Targetnya, yang bisa Diukur setiap Triwulan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP	1 Laporan	28.420.000	0 Laporan	12.560.000	Dukungan Anggaran yang sudah mencukupi	Kinerja berupa Laporan Disampaikan pada Akhir Tahun Berjalan atau pada Awal Tahun Berikutnya	Mengubah Indikator Program berikut Targetnya, yang bisa Diukur setiap Triwulan
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP	1 Laporan	351.089.600	0 Laporan	153.806.000	Dukungan Anggaran yang sudah mencukupi	Kinerja berupa Laporan Disampaikan pada Akhir Tahun Berjalan atau pada Awal Tahun Berikutnya	Mengubah Indikator Program berikut Targetnya, yang bisa Diukur setiap Triwulan
30	Kecamatan Parangin Selatan								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71,46 Nilai	7.879.568.695	76,40*	3.243.361.948	Adanya Monitoring dan Evaluasi dari PA dan PPK Terhadap PPTK Agar Melaksanakan Kegiatan Sesuai Dengan Aliran Kas	Aplikasi E-Katalog Versi Terbaru Banyak Pihak Penyedia Yang Produknya Belum Tayang dan Disetujui Sehingga Pengadaan Menjadi Terlambat	Melakukan Koordinasi Dengan Pihak UKPBJ dan Pihak Penyedia
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1 Laporan	290.052.300	0 Laporan	148.445.000	Adanya Monitoring dan Evaluasi dari PA dan PPK Terhadap PPTK Agar Melaksanakan Kegiatan Sesuai Dengan Aliran Kas	Aplikasi E-Katalog Versi Terbaru Banyak Pihak Penyedia Yang Produknya Belum Tayang dan Disetujui Sehingga Pengadaan Menjadi Terlambat	Melakukan Koordinasi Dengan Pihak UKPBJ dan Pihak Penyedia
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1 Laporan	2.195.305.000	0 Laporan	441.851.455	Adanya Monitoring dan Evaluasi dari PA dan PPK Terhadap PPTK Agar Melaksanakan Kegiatan Sesuai Dengan Aliran Kas	Aplikasi E-Katalog Versi Terbaru Banyak Pihak Penyedia Yang Produknya Belum Tayang dan Disetujui Sehingga Pengadaan Menjadi Terlambat	Melakukan Koordinasi Dengan Pihak UKPBJ dan Pihak Penyedia
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	54.340.000	0 Laporan	18.000.000	Adanya Monitoring dan Evaluasi dari PA dan PPK Terhadap PPTK Agar Melaksanakan Kegiatan Sesuai Dengan Aliran Kas	Ada Kegiatan Yang Mengalami Perubahan Pelaksanaan	Melakukan Penyesuaian Jadwal Kegiatan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1 Laporan	11.720.000	0 Laporan	4.430.000	Adanya Monitoring dan Evaluasi dari PA dan PPK Terhadap PPTK Agar Melaksanakan Kegiatan Sesuai Dengan Aliran Kas	Ada Kegiatan Yang Mengalami Perubahan Pelaksanaan	Melakukan Penyesuaian Jadwal Kegiatan
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Laporan	197.620.000	0 Laporan	84.250.000	Adanya Monitoring dan Evaluasi dari PA dan PPK Terhadap PPTK Agar Melaksanakan Kegiatan Sesuai Dengan Aliran Kas	Ada Sub Yang Tidak Jadi Drealisasikan Karena Perubahan Pelaksanaan Kegiatan	Melakukan Pergeseran Anggaran
31	Kecamatan Juai								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akurabilitas Kinerja Kecamatan Juai	68 Nilai	4.576.106.132,00	75,15*	2.273.360.416	(1) SDM ASN khususnya PPTK telah dilakukan upaya peningkatan kapasitas mengenai pengelolaan keuangan dan pencapaian kinerja sehingga PPTK meningkat pemahamannya tentang anggaran kas, penatausahaan keuangan dan pelaporan capaian kinerja. (2) Peningkatan kapasitas mengenai teknis kegiatan masing-masing sub bagian dan seksi telah dilaksanakan melalui kolaborasi bimtek/pelatihan (3) Belanja telah direalisasikan sesuai anggaran kas	(1) Pengadaan melalui e catalog sedikit terhambat karena perubahan versi (2) Terjadi perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga realisasi tertunda (3) Ada kesalahan penganggaran belanja sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran belanja agar dapat direalisasikan	(1) Menyusun usulan pergeseran anggaran di tahapan penyusunan anggaran perubahan TA 2025 (2) Melakukan realisasi anggaran sesuai dengan anggaran kas yang telah disusun
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1 Laporan	497.394.200	0 Laporan	105.491.800	(1) SDM ASN khususnya PPTK telah dilakukan upaya peningkatan kapasitas mengenai pengelolaan keuangan dan pencapaian kinerja sehingga PPTK meningkat pemahamannya tentang anggaran kas, penatausahaan keuangan dan pelaporan capaian kinerja. (2) Peningkatan kapasitas mengenai teknis kegiatan masing-masing sub bagian dan seksi telah dilaksanakan melalui kolaborasi bimtek/pelatihan (3) Belanja telah direalisasikan sesuai anggaran kas	(1) Pengadaan melalui e catalog sedikit terhambat karena perubahan versi (2) Terjadi perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga realisasi tertunda (3) Ada kesalahan penganggaran belanja sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran belanja agar dapat direalisasikan	(1) Menyusun usulan pergeseran anggaran di tahapan penyusunan anggaran perubahan TA 2025 (2) Melakukan realisasi anggaran sesuai dengan anggaran kas yang telah disusun

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah laporan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	1 Laporan	189.988.900	0 Laporan	67.467.200	(1) SDM ASN khususnya PPTK telah dilakukan upaya peningkatan kapasitas mengenai pengelolaan keuangan dan pencapaian kinerja sehingga PPTK meningkat pemahamannya tentang anggaran kas, penatausahaan keuangan dan pelaporan capaian kinerja. (2) Peningkatan kapasitas mengenai teknis kegiatan masing-masing sub bagian dan seksi telah dilaksanakan melalui keikutsertaan bimtek/pelatihan (3) Belanja telah direalisasikan sesuai anggaran kas	(1) Pengadaan melalui e catalog sedikit terhambat karena perubahan versi (2) Terjadi perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga realisasi tertunda	(1) Menyusun usulan pengeseran anggaran di tahapan penyusunan anggaran perubahan TA 2025 (2) Melakukan realisasi anggaran sesuai dengan anggaran kas yang telah disusun
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah laporan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	1 Laporan	145.721.400	0 Laporan	48.968.350	(1) SDM ASN khususnya PPTK telah dilakukan upaya peningkatan kapasitas mengenai pengelolaan keuangan dan pencapaian kinerja sehingga PPTK meningkat pemahamannya tentang anggaran kas, penatausahaan keuangan dan pelaporan capaian kinerja. (2) Peningkatan kapasitas mengenai teknis kegiatan masing-masing sub bagian dan seksi telah dilaksanakan melalui keikutsertaan bimtek/pelatihan (3) Belanja telah direalisasikan sesuai anggaran kas	(1) Pengadaan melalui e catalog sedikit terhambat karena perubahan versi (2) Terjadi perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga realisasi tertunda (3) Ada kesalahan penganggaran belanja sehingga memerlukan perubahan/pengeseran anggaran belanja agar dapat direalisasikan	(1) Menyusun usulan pengeseran anggaran di tahapan penyusunan anggaran perubahan TA 2025 (2) Melakukan realisasi anggaran sesuai dengan anggaran kas yang telah disusun
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	1 Laporan	78.776.400	0 Laporan	24.864.400	(1) SDM ASN khususnya PPTK telah dilakukan upaya peningkatan kapasitas mengenai pengelolaan keuangan dan pencapaian kinerja sehingga PPTK meningkat pemahamannya tentang anggaran kas, penatausahaan keuangan dan pelaporan capaian kinerja. (2) Peningkatan kapasitas mengenai teknis kegiatan masing-masing sub bagian dan seksi telah dilaksanakan melalui keikutsertaan bimtek/pelatihan (3) Belanja telah direalisasikan sesuai anggaran kas	(1) Pengadaan melalui e catalog sedikit terhambat karena perubahan versi (2) Terjadi perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga realisasi tertunda	(1) Menyusun usulan pengeseran anggaran di tahapan penyusunan anggaran perubahan TA 2025 (2) Melakukan realisasi anggaran sesuai dengan anggaran kas yang telah disusun
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1 Laporan	337.946.300	0 Laporan	101.881.300	(1) SDM ASN khususnya PPTK telah dilakukan upaya peningkatan kapasitas mengenai pengelolaan keuangan dan pencapaian kinerja sehingga PPTK meningkat pemahamannya tentang anggaran kas, penatausahaan keuangan dan pelaporan capaian kinerja. (2) Peningkatan kapasitas mengenai teknis kegiatan masing-masing sub bagian dan seksi telah dilaksanakan melalui keikutsertaan bimtek/pelatihan (3) Belanja telah direalisasikan sesuai anggaran kas	(1) Pengadaan melalui e catalog sedikit terhambat karena perubahan versi (2) Terjadi perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga realisasi tertunda	(1) Menyusun usulan pengeseran anggaran di tahapan penyusunan anggaran perubahan TA 2025 (2) Melakukan realisasi anggaran sesuai dengan anggaran kas yang telah disusun
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	80.4 Persen	10.923.306.888	0	3.802.765.460	Adanya dukungan alokasi anggaran kegiatan-kegiatan pendukung layanan SKPD	adanya efisiensi anggaran terhadap kegiatan-kegiatan pendukung layanan SKPD	Menyusun alokasi anggaran kegiatan -kegiatan pendukung layanan SKPD yang tersedia ke dalam kegiatan yang lebih di prioritaskan
		PERSENTASE TEMUAN BPK YANG DITINDAKLANJUTI	100 Persen		0				
		NILAI SKM PERANGKAT DAERAH	90 Persen						
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	PERSENTASE PELAKU USAHA PERDAGANGAN YANG MEMPEROLEH IZIN SESUAI DENGAN KETENTUAN	18.42 Persen	118.505.000	0	13.632.000			
		PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN PENGENDALIAN FASILITAS PENYIMPANAN BAHAN BERBAHAYA DAN PENGAWASAN DISTRIBUSI, PENGEMASAN DAN	100 Persen		0				
	PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PERSENTASE PASAR DI KABUPATEN BALANGAN YANG MEMENUHI STANDAR KELAYAKAN PASAR	10 Persen	2.064.992.600	0	685.746.787			
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	PERSENTASE STABILITAS DAN JUMLAH KETERSEDIAAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK	7 Persen	917.667,200	0	310.901.500	Adanya target yang harus dipenuhi atau dikejar	Adanya kenaikan harga barang tertentu. Faktor cuaca/ hujan yang tidak bisa di prediksi	Perlu dilakukan kegiatan pasar murah atau operasi pasar ketika harga suatu barang naik. Misalnya Minyak Goreng, Beras, Bawang Merah
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKU USAHA EKSPOR	70 Persen	167.685.900	0	49.213.272			
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN METROLOGI LEGAL DILAKSANAKAN	76.92 Persen	316.995,200	0	134.549.300	- Tidak adanya lagi biaya retribusi tera - Adanya layanan tera di kantor pada jam kerja	Kurangnya tenaga reparatr ahli dan masyarakat belum menyadari tentang pentingnya tera/tera ulang	sosialisasi tentang tera/tera ulang melalui media sosial serta dibukanya kontak person layanan tera/tera ulang
		PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN PENGAWASAN METROLOGI LEGAL DILAKSANAKAN	29.16 Persen		0				
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	PERSENTASE PENINGKATAN NILAI PRODUK LOKAL	21.74 Persen	1.455.133.100	0	1.084.709.611			
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PERSENTASE IKM YANG MENERAPKAN TEKNOLOGI INDUSTRI	14 Persen	652.390.000	0	70.163.109		Karena adanya efisiensi anggaran pada awal tahun, berdampak pada pengurangan jumlah kuota peserta pelatihan, sehingga menunggu APBD Perubahan untuk mengembalikan jumlah kuota peserta yang akan dilatih	Akan menjadwalkan ulang waktu kegiatan pelatihan, disesuaikan dengan waktu pengesahan APBD Perubahan
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	PERSENTASE PERTUMBUHAN IKM	2.11 Persen	133.214.000	0	2.822.000	Adanya persyaratan untuk membuat akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIInas) kepada pelaku usaha yang ingin mendapatkan fasilitasi dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan khususnya Bidang Perindustrian		
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	PERSENTASE SKALA USAHA IKM YANG BERKEMBANG	2.58 Persen	750.091,900	0	266.822.530			